

Bab II

Tinjauan Teori dan data Fasilitas Edukasi Anti Korupsi

II.2.1 Pengertian Korupsi

Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “corruptio” (Fockema Andrea: 1951) atau “corruptus” (Webster Student Dictionary: 1960). Juga, kata "corruptio" berasal dari bahasa Latin kuno "corrumpere". Dari bahasa Latin dikenal kata “corruption” (Inggris), “corruption” (Perancis), dan “corruptie/korruptie” (Belanda). Kata korupsi secara harafiah berarti korupsi, kebobrokan, korupsi, ketidakadilan, penyuapan, maksiat dan penyimpangan. Malaysia mempunyai undang-undang antikorupsi dan menggunakan kata “resuah” yang berasal dari bahasa Arab “risywah”, menurut kamus populer Arab-Indonesia artinya sinonim dengan korupsi (Andi Hamzah: 2002). Risywah (penyuapan) secara teknis berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau kepada orang lain dengan tujuan untuk menang secara tidak adil atau memperoleh kedudukan (al-Misbah al-Munir-al Fayumi, al-Muhalla-Ibnu Hazm). Semua ulama sepakat bahwa perpajakan haram hukumnya. Hal ini juga ditunjukkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi: “Mereka adalah orang-orang yang senang mendengar berita bohong dan banyak memakan makanan yang haram” (QS Al Maidah 42). Imam al-Hasan dan Sayyid bin Jubair menerjemahkan 'akkaaluna lissuhti' menjadi 'rywah'. Dengan kata lain suap itu seperti memakan apa yang diharamkan Allah. Oleh karena itu, meminta suap, memberi suap, atau menerima suap adalah haram.

1. Korupsi berarti menerima suap, menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan seseorang, dan sebagainya;
2. korupsi artinya ketidakjujuran, seperti mencuri uang, menerima suap; Lagi
3. Korup adalah orang yang berperilaku korup. Oleh karena itu kata korupsi mempunyai arti korupsi, kejahatan dan kehancuran, dan berdasarkan hal tersebut maka korupsi meliputi : tingkah laku yang buruk, situasi atau keadaan yang korup, kedudukan dalam instansi atau organisasi pemerintah, penyalahgunaan kekuasaan dengan pemberian, pokok-pokok organisasi – ekonomi dan politik, perpindahan. anggota keluarga. atau siapa yang memiliki posisi, dll. Lihat.

II.2.2 Penyebab Korupsi

Berbagai hal menjadi penyebab terjadinya korupsi, baik di dalam diri pelaku zalim maupun di luar diri pelaku zalim. Seperti yang dikatakan Yamamah, ketika perilaku sosial material dan konsumen serta sistem politik “membuat” material, maka hal tersebut dapat “memaksa” keuntungan dan korupsi (Ansari Yamamah: 2009 “Dalam kondisi seperti ini, hampir semua perwakilan akan melakukan” dan menjadi 'dipaksakan' 2.2 Jenis-jenis korupsi : Perilaku korup ketika dalam pengawasan.” Nur Syam, (2000) atas anggapan bahwa orang melakukan korupsi adalah materi atau kekayaan yang tidak dapat diuji. Ketika keinginan menjadi kaya tidak terhalangi sementara aksesnya agar kekayaan dapat diperoleh melalui korupsi, maka seseorang akan melakukan korupsi-Jadi, jika menggunakan gagasan tentang penyebab korupsi ini, salah satu penyebab korupsi adalah cara Anda memandang kekayaan. Cara memandang kata yang salah akan menyebabkan cara yang salah dalam meraih kata. Sudut pandang lain dikemukakan oleh Ari Fin yang mengidentifikasi faktor-faktor penyebab korupsi, antara lain: (1) faktor perilaku individu (2) faktor organisasi, dan (3) faktor sosial dimana orang dan organisasi berada (Arifin: 2000). Mengenai ciri-ciri perilaku individu, Isa Wahyudi memberikan gambaran bahwa alasan seseorang melakukan perilaku korupsi dapat berupa semacam motivasi dari dalam diri, yang dapat dikatakan berupa keinginan, tekad atau kesadaran untuk melakukannya. Dijelaskannya pula, penyebab masyarakat terpaksa melakukan korupsi adalah: (a) keserakahan manusia, (b) karakter yang tidak mampu menahan godaan, (c) gaya hidup konsumeris, (d) kurangnya keinginan (malas) untuk bekerja keras. (Isa Wahyudi : 2007). Tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas, Erry Riyana Hardjapamekas (2008) mengatakan bahwa banyaknya kasus korupsi di negeri ini disebabkan oleh banyak faktor antara lain: (1) Kurangnya keteladanan dan kepemimpinan negara yang populer, (2) Kecilnya . Gaji PNS, (3) Lemahnya dan tidak konsistennya komitmen terhadap hukum dan penegakan hukum perundangan, (4) Rendahnya integritas dan profesionalisme, (5) Prosedur pengawasan internal di seluruh bank, lembaga keuangan dan pegawai belum terjamin dengan baik, (6) Kondisi kerja, pelayanan dan lingkungan sosial, dan (7) Lemahnya keimanan, kejujuran, kesopanan, moral dan perilaku. Secara umum hal-hal yang menjadi penyebab korupsi dapat terjadi

karena faktor politik, hukum, dan ekonomi, seperti dalam buku Peran Parlemen dalam Pemberantasan Korupsi (ICW: 2000) yang menyebutkan empat faktor penyebab korupsi, yaitu penyebab politik, penyebab hukum faktor ekonomi dan industri serta faktor internasional.

II.2.2.1 Faktor Politik

Politik adalah salah satu penyebab korupsi. Hal ini terlihat ketika terjadi ketidakadilan politik, kepentingan politik penguasa, bahkan ketika mereka mengambil dan memegang kekuasaan. Korupsi seperti suap dan politik uang sering terjadi. Dalam hal ini, Terrence Gomes (2000) mendefinisikan politik finansial sebagai penggunaan uang dan kepentingan material dalam mengejar pengaruh politik. Menurut Susanto, korupsi di tingkat pemerintahan adalah soal uang, pencurian suap, pemberian keamanan, pencurian harta benda umum untuk kepentingan pribadi, yang dianggap korupsi yang disebabkan oleh partai politik (Susanto : 2002). Sedangkan menurut De Asis, korupsi politik meliputi kecurangan (manipulasi keuangan) dalam pemilihan anggota parlemen atau pejabat tinggi, dana ilegal untuk membiayai kampanye, penyelesaian debat parlemen dengan menggunakan metode dan teknik ilegal untuk mencoba memisahkan diri (De Asis: 2000). Kajian James Scott (Mochtar Mas' oed: 1994) menjelaskan bahwa dalam masyarakat yang tetap berpegang pada institusi politik hanya ketika persaingan politik terbatas pada jumlah orang yang rendah dan perbedaan antar pemimpin lebih didasarkan pada kelompok orang, hal tersebut tidak terjadi. . tentang masalah kebijakan, yang biasanya terjadi. Tekanan budaya dan proses korupsi tercermin dalam praktik korupsi yang dilakukan pegawai. Robert Klitgaard (2005) menjelaskan proses peluruhan terjadi melalui pembentukan $M+D-A=C$. Simbol M adalah monopoli, D adalah kebijaksanaan, dan A adalah akuntansi. Arti dari simbol ini dapat dikatakan bahwa korupsi merupakan hasil penguasaan (kekuasaan) yang datang dengan kewenangan yang besar tanpa adanya keterbukaan dan pertanggungjawaban.

II.2.2.2 Faktor Hukum

Aspek hukum dapat dilihat dari dua sisi, di satu sisi hukum dan di sisi lain lemahnya penegakan hukum. Bibit kejahatan hukum mudah ditemukan pada arah

yang diskriminatif dan tidak adil; aturan yang tidak jelas (non-lex certa) karena multitafsir; konflik dan tumpang tindih dengan proses lain (baik normal maupun superior). Hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatan yang dilarang karena tidak ada tujuan dan terdengar terlalu ringan atau terlalu berat; Penggunaan gagasan-gagasan yang berbeda-beda dalam satu hal yang sama, semuanya memungkinkan proses tersebut konsisten dengan realitas yang ada dan tidak bersifat tidak realistis atau dibuat-buat dan menemui pertentangan. Penyebab situasi ini sangat berbeda-beda, namun penyebab utamanya adalah sebagai berikut: Pertama, negosiasi dan perang kepentingan antar partai dan kelompok parlemen, sehingga menghasilkan undang-undang yang tidak memihak dan diskriminatif. Kedua, praktik politik uang dalam pembuatan undang-undang berbentuk suap politik, khususnya terkait undang-undang di bidang ekonomi dan komersial. Akibatnya timbullah undang-undang yang luas dan komprehensif dan melengkapi undang-undang lainnya sehingga dapat dengan mudah digunakan untuk menyelamatkan pihak-pihak yang memerintahkan. Seringkali ancaman sanksi dibuat begitu ringan sehingga tidak membebani pihak yang terlibat. Sejalan dengan hal tersebut Susila (dalam Hamzah: 2004) mengatakan bahwa korupsi mudah terjadi karena adanya kelemahan peraturan perundang-undangan, antara lain: adanya peraturan perundang-undangan yang mempunyai kepentingan pada tingkat organisasi tertentu. peraturan perundang-undangan - Undang-undang yang memadai, peraturan tidak cukup jelas, sanksi terlalu ringan, penerapan sanksi fleksibel dan sewenang-wenang, titik lemah dalam pemantauan dan peninjauan prosedur hukum. Fakta bahwa banyak produk hukum pada masa Orde Baru yang banyak diamanatkan oleh partai politik dalam rangka meningkatkan kekuasaan, terutama pada masa transisi, masih terus menjadi kenyataan. Banyak pasar hukum yang menjadi ajang perebutan hak kepentingan berbagai kekuatan politik, dengan tujuan mempertahankan dan mengakumulasi kekuasaan. Bibit Samad Riyanto (2009) mengatakan ada lima faktor yang dianggap menjadi penyebab terjadinya korupsi. Yang pertama adalah sistem politik, yang ditandai dengan munculnya prosedur formal, seperti peraturan daerah dan prosedur lainnya; kedua, intensitas perilaku individu atau kelompok; sepertiga lebih sedikit pendapatan atau gaji; yang keempat adalah pengawasan internal dan eksternal; dan yang kelima adalah budaya konformitas.

Dari sekian banyak hal yang kita bawa, yang terpenting adalah budaya ilmu hukum. Dengan mengetahui hukum, masyarakat akan memahami akibat dari perbuatannya. Sementara itu, Rahman Saleh menjelaskan ada empat faktor utama penyebab maraknya korupsi di Indonesia, yaitu penegakan hukum, konspirasi, rendahnya kesadaran masyarakat, dan rendahnya “kemauan politik” (Rahman Saleh: 2006). Kemampuan memobilisasi kelompok kepentingan dan pengusaha untuk melawan pejabat pemerintah dengan menggunakan hadiah, bingkisan, bingkisan dan berbagai pemberian yang bertujuan koruptif membuat semua orang menikmati sisa hasil pembangunan. Fakta ini menunjukkan bahwa korupsi lebih besar kemungkinannya terjadi karena lemahnya bagian hukum atau hanya menguntungkan kelompok tertentu saja. Hal serupa juga dikatakan oleh Basyaib, dkk (Basyaib: 2002) yang mengatakan bahwa lemahnya sistem peraturan perundang-undangan memberikan peluang terjadinya praktik korupsi. Tentu saja masyarakat banyak menemukan kasus-kasus yang menunjukkan diskriminasi dalam sistem penegakan hukum, termasuk putusan pengadilan.

2.2.3 Faktor Organisasi

Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti luas, yang meliputi organisasi lingkungan sosial. Perusahaan yang menjadi korban korupsi atau tempat terjadinya korupsi seringkali turut serta melakukan korupsi karena membuka peluang atau peluang terjadinya korupsi (Tunggal 2000). Jika organisasi tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada seseorang untuk melakukan korupsi, maka korupsi tidak akan terjadi. Faktor-faktor penyebab korupsi dari sudut pandang organisasi adalah: kurangnya teladan pemimpin, kurangnya budaya organisasi yang baik, sistem akuntansi yang tidak memadai di instansi pemerintah, manajemen selalu menyimpan korupsi dalam diri mereka. . rencanamu. Sehubungan dengan Lyman W. Porter, (1984) mendokumentasikan tujuan organisasi: memusatkan perhatian, memberikan sumber hukum, mempengaruhi struktur organisasi, bertindak sebagai standar, memberikan petunjuk tentang organisasi. Fokus dapat digunakan oleh anggota sebagai metode panduan untuk memfokuskan upaya dan aktivitas anggota dan organisasi secara keseluruhan. Untuk keperluan organisasi, para anggota dapat mempunyai pedoman yang jelas tentang segala kegiatan dan apa

yang boleh dilakukan, serta apa yang sebaiknya dilakukan dalam kerangka organisasi. Jadi tindakan-tindakan yang berkaitan dengan tindakan dalam organisasi selalu diarahkan pada tujuan organisasi, disadari atau tidak.

Dalam fungsinya sebagai dasar persetujuan atau pembenaran terhadap tujuan organisasi, anggota dapat menggunakannya sebagai dasar pembenaran dan kebenaran tindakan dan keputusannya. Tujuan organisasi juga untuk memberikan pedoman (berguna) bagi para anggotanya. Dalam pekerjaan ini, tujuan organisasi adalah untuk menghubungkan anggotanya dengan berbagai proses dalam kelompok. Ia berfungsi untuk membantu anggotanya menentukan cara terbaik untuk melakukan tugas dan tindakan.

Level tindakan inilah yang akan menjadi patokan dalam perhitungan bobot tindakan. Mengapa? Karena suatu organisasi hanya dapat berfungsi dengan baik jika para anggotanya mau bersatu di bawah suatu pedoman perilaku (standar), maka kita dapat mengatakan bahwa hidup bersama hanya mungkin terjadi jika para anggotanya mau patuh dan mengikuti “aturan main”. kamu telah memutuskan. Di sinilah kurangnya teladan pemimpin dapat menciptakan korupsi.

2.2.4 Faktor Internal

a. Aspek Perilaku Individu

- **Sifat Tamak/Rakus Manusia**

Korupsi bukan dosa kecil karena butuh pangan. Korupsi adalah kesalahan para profesional yang tamak. Itu sudah cukup, tapi kamu serakah. Dia memiliki keinginan besar untuk menjadikan dirinya kaya. Yang menyebabkan kerusakan pada orang-orang yang berbuat jahat itu berasal dari hatinya, yaitu keserakahan dan ketamakan. Oleh karena itu, diperlukan tindakan drastis tanpa kompromi.

- **Moral Yang Kurang Kuat**

Seseorang yang berkepribadian lemah mudah tergoda untuk berbuat kerusakan. Godaan bisa datang dari atasan, teman sejawat, bawahan, atau kelompok lain yang memberikan kesempatan untuk melakukan hal tersebut.

- **Gaya Hidup Yang Konsumtif**

Tinggal di kota besar seringkali meningkatkan gaya hidup konsumen. Perilaku

yang tidak diimbangi dengan uang yang cukup akan membuka peluang bagi manusia untuk melakukan berbagai tindakan guna mewujudkan keinginannya. Salah satu tindakan yang mungkin dilakukan adalah korupsi.

b. Aspek Sosial

Perilaku buruk bisa terjadi karena motivasi keluarga. Para antropolog mengatakan bahwa lingkungan keluarga mendorong orang untuk melakukan hal-hal buruk dan mengatasi sifat-sifat baik yang telah menjadi miliknya. Dalam hal ini, alam justru memberikan dorongan dan bukan hukuman kepada manusia ketika mereka menyalahgunakan potensi yang dimilikinya.

2.2.5 Faktor Eksternal

a. Aspek Sikap Masyarakat Terhadap Korupsi

Secara umum, manajer sering kali menutupi praktik korupsi yang dilakukan segelintir orang dalam organisasi. Karena penutupan ini, tindak pidana korupsi terus terjadi dengan berbagai cara. Oleh karena itu, sikap masyarakat yang dapat mendorong perilaku buruk terjadi karena:

- Nilai-nilai dalam masyarakat dikaitkan dengan korupsi. Korupsi dapat diciptakan oleh budaya sosial. Misalnya masyarakat menghormati seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Perilaku ini seringkali menyebabkan orang salah memahami situasi, misalnya saat kita melihat ucapan.
- Masyarakat tidak mengetahui bahwa pelaku korupsi adalah masyarakat itu sendiri. Opini masyarakat terhadap kasus korupsi adalah yang paling menderita adalah pemerintah. Padahal, jika suatu negara kehilangan rakyatnya, maka ia akan kehilangan banyak rakyatnya karena anggaran pembangunan bisa berkurang akibat korupsi.
- Masyarakat tidak mengetahui bahwa dirinya terlibat korupsi. Semua praktik korupsi adalah anggota masyarakat. Warga negara hanya tahu sedikit tentang hal ini. Faktanya, seringkali masyarakat setiap hari melakukan korupsi dengan cara yang terbuka dan tidak diketahui.

- Masyarakat tidak menyadari bahwa korupsi dapat dicegah dan dihilangkan jika semua orang berperan aktif dalam proses pencegahan dan pemberantasannya. Secara umum masyarakat beranggapan bahwa permasalahan korupsi adalah tanggung jawab pemerintah semata. Masyarakat tahu bahwa korupsi bisa diberantas jika semua orang melakukannya.

b. Aspek Ekonomi

Pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Semasa hidupnya, tidak menutup kemungkinan seseorang akan berada dalam keadaan darurat ekonomi. Keadaan darurat membuka kemungkinan bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas di antara dirinya sendiri dengan melakukan korupsi

c. Aspek Politik

Menurut Rahardjo (1983), kontrol sosial adalah suatu proses yang dilaksanakan untuk memotivasi orang agar berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat. Kontrol sosial tersebut dilakukan dengan menggerakkan berbagai kegiatan yang mencakup penggunaan kekuasaan negara sebagai lembaga yang terorganisir secara politik, melalui lembaga-lembaga yang diciptakannya. Dengan demikian, ketidakstabilan politik, kepentingan politik, perebutan dan mempertahankan kekuasaan dapat menyebabkan perilaku korupsi.

d. Aspek Organisasi

- **Kurang adanya sikap keteladanan pemimpin**

Kedudukan seorang pemimpin pada suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap bawahannya. Jika seorang pemimpin tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada bawahannya, misalnya dengan melakukan korupsi, maka besar kemungkinan bawahannya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya.

- **Tidak adanya kultur organisasi yang benar**

Budaya organisasi pada umumnya mempunyai pengaruh yang kuat terhadap para anggotanya. Budaya organisasi yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai situasi kurang baik yang akan mewarnai kehidupan organisasi. Dalam situasi seperti itu, tindakan negatif bisa saja terjadi, seperti korupsi.

- **Kurang memadainya sistem akuntabilitas**
- Di satu sisi, lembaga pemerintah pada umumnya belum merumuskan secara jelas visi dan misi yang diusungnya, serta belum merumuskan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam waktu tertentu untuk mencapai hal tersebut. Akibatnya, sulit bagi lembaga pemerintah untuk menilai apakah mereka berhasil mencapai tujuan mereka atau tidak. Akibat lainnya adalah kurangnya perhatian terhadap efisiensi penggunaan sumber daya yang ada. Situasi ini menciptakan situasi organisasi yang menguntungkan bagi praktik korupsi.
- **Kelemahan sistim pengendalian manajemen**
 Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat terjadinya tindakan korupsi dalam suatu organisasi. Semakin longgar/lemah kendali manajemen suatu organisasi, maka semakin terbuka pula tindakan korupsi yang dilakukan oleh anggota atau pegawainya.
- **Lemahnya pengawasan**
 Secara umum pengendalian dibedakan menjadi dua, yaitu pengendalian internal (pengendalian fungsional dan pengendalian manajemen langsung) dan pengendalian eksternal (pengendalian legislatif dan masyarakat). Pengawasan ini tidak bisa efektif karena banyak faktor, termasuk tumpang tindihnya pengawasan di berbagai instansi, kurangnya pengawasan profesional, dan kurangnya kepatuhan terhadap hukum dan etika pemerintah oleh para pengawas itu sendiri.

II.2.3 Sejarah Korupsi

Korupsi di Indonesia telah “mengakar” sejak lama, sebelum dan sesudah kemerdekaan, pada masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan hingga masa Reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih belum terlihat. Periodisasi korupsi di Indonesia secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu masa pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. (Amin Rahayu).

NO	PERIODE	PERILAKU KORUPSI DAN PEMBERANTASANNYA
1	PRA KEMERDEKAAN	1. MASA PEMERINTAHAN KERAJAAN

	<ul style="list-style-type: none"> • Budaya dan tradisi korupsi yang terus berlanjut dipicu oleh dorongan kuat untuk meraih kekuasaan, kekayaan, dan wanita. • Perebutan kekuasaan di Kerajaan Singosari: Konflik perebutan takhta yang berlangsung hingga tujuh generasi, dengan dendam dan pembalasan di antara keturunan, seperti yang terlihat pada Berikut adalah penulisan ulang dari pernyataan tersebut: • Kerajaan Singosari : Dinasti Anusapati, Tohjaya, Ranggawuni, Mahesa Wongateleng, dan penerus-penerusnya yang terlibat dalam perebutan kekuasaan. • Majapahit : Rentetan pemberontakan seperti Kuti, Nambi, Suro, dan lainnya menunjukkan konflik internal yang melanda kerajaan ini. • Demak : Pertarungan kekuasaan antara Joko Tingkir dan Haryo Penangsang mencerminkan ketegangan di kerajaan ini. • Banten : Sultan Haji merebut tahta dari ayahnya, Sultan Ageng Tirtayasa, menandai intrik dalam perebutan kekuasaan di kerajaan ini. • Sejarah Korupsi dan Kekuasaan di Indonesia: Perebutan kekuasaan, perlawanan rakyat terhadap Belanda, dan peralihan kekuasaan berulang kali di Nusantara telah menjadi bagian dari sejarah korupsi dan kekuasaan di Indonesia. • Kehancuran kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram dipengaruhi oleh
--	---

		<p>perilaku korup para bangsawan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sriwijaya : Kerajaan ini runtuh karena tidak ada pengganti atau penerus setelah Bala Putra Dewa. • Majapahit : Hancur akibat perang saudara (Perang Paregreg) setelah wafatnya Maha Patih Gajah Mada. • Mataram : Melemah dan kehilangan kekuatannya akibat dipecah belah oleh Belanda. • Masa Kolonial Belanda : • Perjanjian Giyanti 1755 : VOC membagi Kerajaan Mataram menjadi dua kekuasaan, Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. • Tahun 1757/1758 : VOC melanjutkan strategi pecah belah dengan memecah Kasunanan lebih lanjut. • Perjanjian VOC pada tahun 1757/1758: Kasunanan Surakarta dipecah menjadi dua wilayah kekuasaan, yaitu Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran. • Kesultanan Yogyakarta juga dibagi menjadi dua kekuasaan, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman. • Buku <i>History of Java</i> karya Thomas Stamford Raffles (Gubernur Jenderal Inggris yang memerintah Pulau Jawa pada tahun 1811-1816) memuat pandangan menarik tentang karakter penduduk Jawa. Penduduk Jawa digambarkan sebagai orang yang sangat
--	--	---

		<p>"nrimo" atau pasrah terhadap keadaan. Di sisi lain, mereka memiliki keinginan yang kuat untuk dihargai oleh orang lain. Selain itu, mereka cenderung tidak terus terang, sering menyembunyikan persoalan, dan termasuk Berikut adalah penulisan ulang dari pernyataan tersebut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengambil keuntungan di saat orang lain tidak mengetahui adalah kebiasaan yang sering terjadi. Hal ini juga tercermin dalam perilaku bangsawan yang gemar menumpuk harta dan memelihara abdi dalem. Abdi dalem sering kali lebih suka mencari perhatian majikannya dengan bersikap oportunistik dan mencari muka. • Kalangan elit kerajaan, termasuk raja, cenderung lebih suka dipuji, dihormati, dan dihargai, serta tidak menyukai kritik atau saran. • Dalam aspek ekonomi, raja dan kaum bangsawan mendominasi sumber daya ekonomi, sementara rakyat dibiarkan miskin, tertindas, dan tunduk pada kehendak penguasa. • Budaya tertutup dan penuh keculasan ini turut menyuburkan budaya korupsi di Nusantara. Abdi dalem sering kali mengkorup upeti (pajak) yang dikumpulkan dari rakyat sebelum diserahkan kepada Demang (Lurah), dan selanjutnya diserahkan kepada Tumenggung. Abdi dalem di tingkat
--	--	--

		<p>Katemenggungan (setara dengan kabupaten atau provinsi) juga sering mengkorup harta sebelum diserahkan kepada Raja atau Sultan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebiasaan mengambil upeti dari rakyat kecil yang dilakukan oleh raja-raja Jawa kemudian diadopsi oleh Belanda ketika mereka Pada periode penjajahan Belanda (1800-1942), kecuali selama Zaman Inggris (1811-1816), kebijakan Belanda menyebabkan banyak perlawanan rakyat. Contohnya termasuk perlawanan Diponegoro (1825-1830), Imam Bonjol (1821-1837), dan Perang Aceh (1873-1904). • Penindasan terhadap penduduk pribumi yang terjajah tidak hanya dilakukan oleh Belanda, tetapi juga oleh bangsa Indonesia sendiri. Salah satu contohnya adalah penyelewengan dalam pelaksanaan Sistem "Cultuurstelsel" (CS), yang secara harfiah berarti Sistem Pembudayaan. Meskipun tujuan utama sistem ini adalah membudayakan tanaman produktif agar hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memberi kontribusi kepada kas Belanda, kenyataannya sangat memprihatinkan.
2	PASCA KEMERDEKAAN	<p>A. ORDE LAMA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berikut adalah penulisan ulang dari pernyataan tersebut: • Badan Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN), yang didirikan berdasarkan

		<p>Undang-Undang Keadaan Bahaya. Panitia ini dipimpin oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh dua anggota, yaitu Prof. M. Yamin dan Roeslan Abdulgani. Namun, implementasi upaya ini ternyata setengah hati dari pihak pemerintah pada waktu itu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pejabat pemerintah diwajibkan untuk mengisi formulir yang disediakan, yang mirip dengan istilah saat ini: daftar kekayaan pejabat negara. Dalam perkembangannya, kewajiban pengisian formulir daftar kekayaan pejabat negara mendapat reaksi keras dari para pejabat. Mereka beralasan bahwa formulir tersebut sebaiknya tidak diserahkan kepada PARAN, melainkan langsung kepada Presiden. • Tahun 1963, melalui Keputusan Presiden No. 275 Tahun 1963, upaya pemberantasan korupsi kembali digalakkan. A.H. Nasution, yang saat itu menjabat sebagai Menkohankam/Kasab, dibantu oleh Wiryono Prodjodikusumo. Tugas mereka adalah membawa kasus-kasus korupsi ke meja pengadilan. Lembaga ini kemudian dikenal dengan sebutan "Operasi Budhi," yang fokus pada perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rentan terhadap praktik korupsi dan kolusi. Namun, Operasi Budhi juga
--	--	---

		<p>menghadapi banyak hambatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soebandrio kemudian mengumumkan pembubaran PARAN/Operasi Budhi, yang kemudian digantikan oleh Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (Kotrar). Dalam struktur baru ini, Presiden Sukarno menjadi ketua, dengan bantuan dari Soebandrio dan Letjen Ahmad Yani ditunjuk untuk membantu Presiden Sukarno dalam memimpin Kotrar. Namun, sejarah mencatat bahwa upaya pemberantasan korupsi pada masa itu akhirnya mengalami stagnasi. • Dalam tiga bulan pertama Operasi Budhi, negara berhasil menyelamatkan keuangan sebesar kurang lebih Rp 11 miliar, sebuah jumlah yang cukup signifikan pada waktu itu. Namun, karena dianggap mengganggu prestise Presiden, Operasi Budhi akhirnya dihentikan. <p>B. ORDE BARU</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dibentuknya Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai oleh Jaksa Agung sebagai upaya pemberantasan korupsi pada masa Orde Baru. • Pada tahun 1970, karena ketidakseriusan TPK dalam menangani kasus-kasus korupsi seperti yang dijanjikan oleh Soeharto, mahasiswa dan pelajar menggelar unjuk rasa untuk memprotes kinerja TPK.
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan-perusahaan negara seperti Bulog, Pertamina, dan Departemen Kehutanan menjadi sorotan publik karena dianggap sebagai sarang korupsi. Gelombang protes dan unjuk rasa mahasiswa yang semakin marak akhirnya ditanggapi oleh Soeharto. • Dibentuklah Komite Empat, yang terdiri dari tokoh-tokoh senior yang dianggap bersih dan Komite Empat dibentuk dengan anggota yang berwibawa, seperti Prof. Johannes, I.J. Kasimo, Mr. Wilopo, dan A. Tjokroaminoto. Tugas utama mereka adalah membersihkan institusi-institusi seperti Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrust, Telkom, dan Pertamina. Namun, komite ini hanya dianggap sebagai "macan ompong" karena temuan mereka terkait dugaan korupsi di Pertamina tidak mendapat tanggapan dari pemerintah. • Ketika Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkopkamtib, dibentuklah Operasi Tertib (Opstib) yang juga bertugas memberantas korupsi. Namun, kebijakan ini hanya melahirkan sinisme di masyarakat. Tidak lama setelah Opstib terbentuk, muncul perbedaan pendapat yang tajam antara Sudomo dan A.H. Nasution. Nasution berpendapat bahwa pemberantasan korupsi harus dimulai dari
--	--	--

		<p>atas jika ingin berhasil. Ia juga menyarankan agar Laksamana Sudomo memulai upaya pemberantasan dari</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nasution menyarankan Sudomo untuk memulai pemberantasan korupsi dari dirinya sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, Operasi Tertib (Opstib) hilang tanpa jejak dan tidak meninggalkan dampak yang signifikan. <p>C. REFORMASI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada era Reformasi, hampir seluruh elemen penyelenggara negara terjangkit "virus korupsi" yang sangat ganas. • Presiden BJ Habibie mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Selain itu, berbagai komisi dan badan baru dibentuk, seperti KPKPN, KPPU, dan lembaga Ombudsman. • Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Meskipun semangat anggota tim untuk memberantas korupsi sangat besar, Mahkamah Agung membubarkan TGPTPK melalui judicial review. Setelah pembubaran ini, Indonesia mengalami kemunduran dalam upaya pemberantasan KKN.
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> • Selain membubarkan TGTPK, Presiden Gus Dur juga dianggap tidak mampu menunjukkan kepemimpinan yang dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi. • Proses pemeriksaan kasus dugaan korupsi yang melibat kan konglomerat Sofyan Wanandi dihentikan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Jaksa Agung Marzuki Darusman. Akhirnya, Gus Dur didera kasus <i>Buloggate</i>. • Di masa pemerintahan Megawati, wibawa hukum semakin merosot, di mana yang menonjol adalah otoritas kekuasaan. • Konglomerat bermasalah bisa mengecoh aparat hukum dengan alasan berobat ke luar negeri. Pemberian SP3 untuk Prajogo Pangestu, Marimutu Sinivasan, Sjamsul Nursalim, The Nien King, lolosnya Sama dikun Hartono dari jeratan eksekusi putusan MA, pemberian fasilitas MSAA kepada konglomerat yang utangnya macet, menjadi bukti kuat bahwa elit pemerintahan tidak serius dalam upaya memberantas korupsi. Masyarakat menilai bahwa pemerintah masih memberi perlindungan kepada para pengusaha besar yang notabene memberi andil bagi kebangkrutan perekonomian nasional. Pemerintah semakin lama semakin kehilangan wibawa. Belakangan kasus-
--	--	--

		<p>kasus korupsi merebak pula di sejumlah DPRD era Reformasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komisi Pemberantasan Korupsi, atau disingkat menjadi KPK, adalah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Pada tanggal 16 Desember 2003, Taufiequrachman Ruki, dilantik menjadi Ketua KPK. KPK hendak memposisikan dirinya sebagai katalisator (pemicu) bagi aparat dan institusi lain untuk terciptanya jalannya sebuah “<i>good and clean governance</i>” (pemerintahan baik dan bersih) di Republik Indonesia. Taufiequrachman walaupun konsisten mendapat kritik dari berbagai pihak tentang dugaan tebang pilih pemberantasan korupsi.
--	--	--

Table 2.1 Sejarah Korupsi

(sumber : Buku Pendidikan Anti Korupsi)

II.2.4 Profesi Yang Rentan Terkena Tindak Pidana Korupsi

TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan
 Statistik TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan
 Statistik 22 Januari 2024

Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi/Jabatan

NO	JABATAN	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	JUMLAH
1	Anggota DPR dan DPRD				2	7	8	27	5	16	8	9	19	23	20	103	10	22	29	35	1	344
2	Kepala Lembaga/Kementerian		1	1		1	1	2		1	4	9	3	2		1	2	4	1	2	4	39
3	Duta Besar				2	1		1														4
4	Komisioner		3	2	1	1											1					8
5	Gubernur	1		2	1	1	2	1			2	3	3	1	1	2	1		1	1	2	25
6	Wakil Kota/Bupati dan Wakil			3	6	6	5	4	3	3	3	12	4	9	13	30	18	8	13	15	8	163
7	Eselon I, II, III dan IV	2	9	15	10	22	14	12	15	8	6	2	7	10	43	24	26	18	20	47	61	371
8	Hakim						1	2	2	3	2	3	1	3	5				1	6	2	31
9	Jaksa					1		2						3	1		3			1	2	13
10	Polisi			1						2										1	1	5
11	Pengacara		2					1					2	2		4	1		1	3	2	18
12	Swasta	1	4	5	3	12	11	8	10	16	24	16	18	26	28	56	50	31	18	27	57	430
13	Lain-lain	4	1	2	3	4	8	1	2	8	8	3	21	13	31	33	20	28	10	22		222
14	Korporasi														1	4	1		1	1		8
	JUMLAH	4	23	30	27	55	45	65	38	50	58	61	62	98	123	260	154	104	114	149	161	1681

Informasi terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi bisa dilihat dalam Kanal Penindakan.

Table 2.2 Profesi yang Tertangkap Korupsi

(sumber: <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>)

II.2.5 Jenis-Jenis Korupsi

1. Kerugian Keuangan Negara

- Bertindak curang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Untuk memberi manfaat bagi diri Anda sendiri atau orang perseorangan atau badan hukum lainnya.
 - Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau badan hukum, penyalahgunaan wewenang, peluang atau sarana yang ada.
- ### 2. Korupsi
- Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat publik atau penyelenggara negara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam lingkup tugasnya; memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat publik atau penyelenggara negara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam pelaksanaan tugasnya.
 - Memberikan sesuatu kepada pejabat publik atau penyelenggara negara dengan maksud untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam pelaksanaan tugasnya;
 - Memberikan sesuatu kepada pejabat publik atau penyelenggara pemerintahan untuk atau sehubungan dengan tugas yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam kapasitasnya; ATAU
 - Memberikan hadiah atau janji kepada pejabat publik dengan mempertimbangkan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau jabatannya, atau yang dalam pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu berkaitan dengan jabatan atau jabatannya.

- Pejabat atau administrator pemerintah menerima hadiah atau janji.
- Pejabat atau perwakilan pemerintah yang menerima hadiah atau janji, meskipun diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk memotivasi mereka agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu di kantornya, yang bertentangan dengan kewajibannya
- Pejabat atau manajer pemerintah menerima hadiah meskipun diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan karena atau disebabkan oleh melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan haknya.
- Penerimaan hadiah atau janji dari pejabat publik atau penyelenggara negara, meskipun diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji itu diberikan atas nama suatu kekuasaan atau wewenang yang berhubungan dengan jabatannya, atau atas nama orang tersebut siapa yang memberi hadiah atau janji itu ada kaitannya dengan jabatannya; atau memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang, meskipun orang tersebut mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah atau janji itu ada hubungannya dengan jabatannya; ATAU
- Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim untuk mempengaruhi keputusan perkara.
- Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pengacara di pengadilan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapatnya terhadap suatu kasus.
- Seorang hakim yang menerima hadiah atau janji meskipun ia mengetahui atau pantas menerima hadiah atau janji tersebut, dapat mencurigai bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi keputusan perkara.

3. Peruntukan dana pada kekuasaan

- Pejabat atau orang lain selain pejabat yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi publik baik tetap maupun sementara, dengan sengaja menyalahgunakan uang atau surat berharga yang disimpan di tempat kerjanya, atau memerintahkan orang lain untuk mengambil atau menyalahgunakan dana atau surat berharga tersebut, atau membantu atau mendorong pelaksanaan tindakan tersebut.

- Para pejabat atau orang-orang yang bukan pejabat yang secara permanen atau sementara terkait dengan pekerjaan publik dengan sengaja memalsukan buku atau daftar yang dimaksudkan untuk pengendalian administratif.
- Pejabat atau orang-orang, selain pejabat, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi publik secara terus-menerus atau sementara, dengan sengaja mengalihkan, menghancurkan atau membuat tidak dapat digunakan lagi suatu dokumen, dokumen, kertas atau daftar yang disimpan sebagai akibat dari fungsinya, yang diberi wewenang untuk ditunjukkan atau disahkan kepada pejabat yang berwenang.
- Pejabat publik atau orang lain selain pejabat publik yang secara sengaja menjalankan fungsi pelayanan publik untuk sementara atau terus-menerus. menyuruh orang lain mengambil, menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai dokumen, akta, surat atau daftar tersebut.
- Seseorang, selain pejabat publik atau pejabat publik, yang secara terus-menerus atau untuk sementara melakukan pelayanan publik, dengan sukarela membantu dan bersekongkol dengan orang lain dalam mengambil, menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat digunakan lagi harta benda, akta, dokumen atau penyimpanannya

4. Pemerasan

- Pejabat atau administrator pemerintah yang secara melawan hukum memerintahkan seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima potongan harga, atau melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri, dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau menyalahgunakan kekuasaannya
- Para pegawai atau aparat negara, yang dalam menjalankan tugasnya, meskipun diketahui atau patut diduga hal itu bukan suatu kewajiban, meminta atau menerima sesuatu dalam fungsinya, seolah-olah itu suatu kewajiban.
- Pejabat atau penyelenggara negara yang dalam menjalankan fungsinya, meskipun diketahui atau patut diduga bukan suatu kewajiban, meminta, menerima atau menahan pembayaran dari pejabat atau penyelenggara negara lain atau ke kas negara, seolah-olah mereka merupakan kewajiban bagi pejabat atau penyelenggara

negara. 5. Tindakan penipuan

- Jika kontraktor, kontraktor konstruksi atau penjual bahan konstruksi melakukan penipuan selama konstruksi atau pengiriman bahan konstruksi yang membahayakan keselamatan orang atau harta benda atau keamanan nasional jika terjadi perang.
 - Apabila seseorang yang mempunyai kedudukan mengawasi pembangunan atau pendistribusian bahan bangunan dengan sengaja membiarkan terjadinya tindakan penipuan.
 - Setiap orang yang menyerahkan barang atas nama Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan negara jika terjadi perang.
 - Setiap orang yang dapat mengawasi peredaran barang atas nama Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dengan sengaja memberi kuasa dan melakukan perbuatan curang.
6. Bentuk minat membeli
- Pejabat publik atau penyelenggara negara dengan sengaja berpartisipasi, secara langsung atau tidak langsung, dalam kontrak, tender publik, atau sewa guna usaha..

7. Gratifikasi

- Remunerasi yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara publik dianggap korupsi jika berkaitan dengan fungsinya dan bertentangan dengan tugas profesionalnya.
- Bertindak tidak jujur untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.
- Untuk memberi manfaat bagi diri Anda sendiri atau orang lain atau badan hukum. Menyalahgunakan wewenang, peluang atau fasilitas yang tersedia untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau badan hukum.

II.2.6 Sejarah Singkat KPK

Seniman tersebut menjelaskan sejarah korupsi dan KPK yang dimulai pada masa Orde Lama. Saat itu Indonesia mengawali dengan dibentuknya Badan Pemberantasan Korupsi, Panitia Pelatihan Ulang Aparatur Negara (PARAN), yang pada tahun 1963 melalui Keputusan Presiden No. 1.275 Tahun 1963, Operasi Budhi diciptakan untuk membawa kasus korupsi ke pengadilan (Cegah Korupsi: 2015). Operasi Budhi yang mendapat kendala akhirnya digantikan oleh Komando

Tertinggi Perlengkapan Kembali Aparatur Revolusi (KOTRAR) yang saat itu dipimpin oleh Presiden Soekarno, dan sejarah mulai mencatat bahwa 'Pemberantasan Korupsi sudah terpasang. Kemudian pada masa Orde Baru, Indonesia kembali membentuk Pasukan Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diarahkan langsung oleh Jaksa Agung, namun karena kurang serius, mahasiswa akhirnya terdorong untuk memprotes keberadaan TPK (Pencegahan Korupsi). 2015). Kemudian lahirlah Komite Empat yang dipimpin oleh empat tokoh lama yang “dianggap” baik dan berwibawa, yaitu Johannes, I.J Kasimo, Wilopo dan A. Tjochromaminoto. Tugas utama panitia ini membersihkan beberapa pihak yakni Kementerian Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrust, Telkom dan Pertamina. Banyak BUMN seperti Bulog, Pertamina dan Kementerian Kehutanan yang banyak disorot masyarakat sebagai daerah korupsi sehingga mendorong mahasiswa untuk kembali berdemonstrasi dan memprotes pemberantasan korupsi (Ade Adhari dan Sherryl Naomi, 2023).

Berbagai upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan penguasa Orde Lama pada masa SBY-JK belum membuahkan hasil yang besar. Hal ini nampaknya wajar jika korupsi dibarengi dengan sistem politik dan birokrasi yang korup, sehingga membentuk budaya korupsi. masyarakat yang menganggap korupsi adalah masalah biasa, bukan sebagai kejahatan atau bencana *the root of all evils* bagi negara. Upaya Kesadaran akan sifat pidana korupsi baru muncul sejak era reformasi tahun 1998, dengan disahkannya undang-undang no. 28 Tahun 1999 “Untuk Penyelenggaraan Negara Bersih dan Korupsi”. Berdasarkan undang-undang tersebut didirikan berbagai lembaga antikorupsi antara lain “KPKPN”, “KPPU” dan “KOMISI ADVOKASI RAKYAT” yang kemudian disahkan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi dan UU No. Komisi Pemberantasan Korupsi. . Hal ini merupakan awal yang baik untuk memulai upaya pemberantasan korupsi di era saat ini, karena memerlukan kerja keras dari semua pihak, tidak hanya Komisi Pemberantasan Korupsi, namun juga seluruh elemen bangsa untuk turut serta langsung dalam pemberantasan korupsi. korupsi. . Hal ini harus menghilangkan anggapan bahwa korupsi adalah warisan sejarah dan budaya masyarakat Indonesia.

2.6 Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi

Dalam bentuknya, KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan

UU No. 30 Tahun 2002 dengan beberapa pertimbangan yang tercantum dalam UU No. 30 Tahun 2002, khususnya: bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional;

- a. bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

II.2.8 Korupsi dai sudut pandang setiap kepercayaan

II.2.8.1 Sudut pandang Islam

1. Risjuvah adalah pemberian yang diberikan seseorang kepada orang lain (jabatan) dengan tujuan menyetujui suatu perbuatan yang tidak sah (yang tidak benar menurut syariat) atau membatalkan suatu perbuatan yang sah. Pemberinya disebut Rashi; penerimanya disebut murtasyi; dan hubungan antara rasyi dan murtasyi disebut raisy (ibn al-Atsir, al-Nihaja fi Gharib al-Hadith wa al-Atsar, II, 226).
2. Pengadilan, uang pelikan, uang politik, dll. dapat digolongkan korupsi apabila tujuannya untuk menyetujui sesuatu yang tidak sah atau membatalkan suatu

perbuatan yang sah.

3. Hadiah kepada Pegawai Negeri adalah pemberian dari seseorang dan/atau masyarakat yang diberikan kepada Pegawai Negeri karena jabatannya, tanpa memandang apakah ia seorang Pegawai Negeri atau lainnya.

Korupsi adalah penguasaan sesuatu dengan cara yang tidak benar menurut hukum Islam.

II.2.8.2 Sudut pandang Katolik

Paus Fransiskus, dalam homilinya saat Misa harian di Domus Sanctae Marthae, 11 November 2013, mengibaratkan korupsi seperti sebuah makam yang tampak indah dari luar karena dicat putih, namun di dalamnya terdapat jenazah atau tulang yang membusuk. . Makamnya indah, tapi saat dibuka, bau busuk menyebar kemana-mana. Ada orang yang mencuri uang negara, atau uang suatu perusahaan atau lembaga, lalu mendonasikan sebagian uang curiannya untuk amal agar terlihat sebagai orang yang baik hati. Inilah kelakuan orang-orang korup, penuh tipu daya, kelicikan dan kemunafikan. Paus Fransiskus dengan tegas menyatakan bahwa orang Kristen yang terlibat korupsi bukanlah orang Kristen. Di Tahun Suci Kemurahan Tuhan yang luar biasa ini, Paus Fransiskus mengajak para koruptor untuk memohon ampun kepada Tuhan. “Saya menyampaikan ajakan yang sama kepada mereka yang melakukan atau terlibat korupsi. Luka membara ini adalah dosa berat yang memerlukan pembalasan di surga, karena merusak fondasi kehidupan pribadi dan sosial itu sendiri. Korupsi menghalangi kita untuk memandang masa depan dengan harapan karena keserakahannya menghancurkan proyek-proyek kelompok lemah dan bertindak sewenang-wenang terhadap kelompok termiskin di antara kelompok miskin. Korupsi merupakan kejahatan yang berakar pada aktivitas sehari-hari, yang menyebar luas dan menimbulkan skandal publik. Korupsi adalah tindakan kekerasan hati yang berdosa yang menggantikan Tuhan dengan ilusi bahwa uang adalah salah satu bentuk kekuasaan. Korupsi adalah pekerjaan kegelapan, yang dipicu oleh kecurigaan dan intrik” (Bulla *Misericordiae Vultus* 19). Selain itu, Paus Fransiskus mengajak kita untuk memberantas korupsi dari kehidupan pribadi kita dan sosial secara bijaksana dan terbuka.

II.2.8.3 Susut pandang Protestan

Orang Kristen belajar bahwa korupsi adalah perilaku yang menyebabkan kerusakan di semua bidang kehidupan. Korupsi bertentangan dengan etos kerja yang diajarkan agama bahwa manusia harus rajin, jujur, dan bersyukur atas apa yang dilakukan dan dipersembahkan. Korupsi bertentangan dengan kodrat manusia sebagai gambaran Tuhan yang wajib menjaga kehormatan dan martabatnya. Harus ada rasa takut terhadap korupsi, rasa malu karena melakukan tindakan korupsi, dan rasa menyesal karena terus melakukan tindakan korupsi. Inilah nilai-nilai luhur yang harus senantiasa diajarkan dan dicontohkan kepada masyarakat. Korupsi pada dasarnya adalah penyakit, penyakit yang berakar pada jiwa manusia, jiwa yang dirusak oleh ego dan kesombongan, inilah dasar korupsi yang paling mendasar. Korupsi terjadi karena adanya insentif dari dalam (motivasi hati yang korup) dan peluang dari luar (peluang, kebutuhan dan ketersediaan) yang kini berkembang dalam bentuk baru, menjadi keserakahan atau kerakusan tanpa batas. Orang yang korup adalah orang yang rakus sehingga menimbulkan kerusakan besar di segala bidang kehidupan. Orang yang korup adalah orang yang dikendalikan oleh pikiran materialistis dan keinginan untuk berkuasa. Keduanya saling melengkapi dan berjalan beriringan.

II.2.8.4 Sudut pandang Hindu

Kita semua tahu bahwa tindakan korupsi melibatkan pengayaan diri sendiri, orang lain, atau perusahaan. Korupsi adalah penggelapan atau penyelewengan (uang negara atau perekonomian negara) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Tindakan ini melanggar norma hukum dan agama. Perbuatan tersebut dilarang keras dalam ajaran Hindu karena merupakan bagian dari perbuatan adharma yang bertentangan dengan kebenaran dan kebajikan..

Kitab suci Sarasamuscaya sloka 263 menyatakan:

"Per pasuria, nēse dharma lwirning karjananya, ya ika labha ngaranya, paramarthaning gjetur le lumturi chante temumwaken ika, kueng yang adharma lwir karjananya, kasmala ika, escala de sang sajjana, matangnyan aywa anasar sangkeng tangarjana"

Terjemahannya: jika harta itu diperoleh atas dasar dharma, maka disebut rejeki, orang yang menerima harta itu akan benar-benar menikmatinya, tetapi jika harta itu diperoleh atas dasar adharma, maka harta itu adalah noda, dihindari oleh orang lain. orang-orang yang mulia. karakter ; oleh karena itu, jangan bertindak melawan dharma dengan meminta sesuatu.

II.2.8.5 Sudut pandang Buddha

Jika pelanggaran moral seperti korupsi sudah begitu mendominasi kehidupan manusia, orator besar Marcus Tullius Cicero tak punya kata-kata untuk mengkritik para koruptor. Teriakkan frustasi Cicero: O Tempora, o Mores! (Oh waktu, oh kebiasaan!). Dalam tradisi Cicero, di nusantara, penyair Ranggowarsito pernah mendengar keluhan tentang istilah terkenal. "Zaman Edan".

Betapa luar biasa fenomena kemerosotan akhlak ini, hingga kini bukan lagi manusia yang dinilai gila, bahkan usia dinilai sebagai pengakuan kegilaan, kegilaan. Gejala kerusakan moral masyarakat juga dibahas dalam Digha Nikaya III.

"Ketika kekayaan tidak disalurkan kepada orang miskin, maka kemiskinan akan menyebar di kalangan masyarakat; oleh karena itu, pencurian merajalel penggunaan senjata penghancuran kehidupan penipuan kebencian pikiran salah perzinahan dalam keluarga, nafsu yang tidak terkendali, keserakahan yang salah mewabah; maka rasa hormat terhadap orang tua, terhadap para petapa dan Brahmana terhadap kepala rumah menjadi berkurang Dalam ras manusia seperti itu, sepuluh jenis perbuatan baik digantikan oleh sepuluh jenis perbuatan buruk bahkan istilah "baik" tidak lagi dikenal, apalagi pembawa kebaikan ditambah pertapa dan brahmana dan kepala keluarga akan tenggelam di dalamnya pergaulan bebas, seperti kambing dan domba, ayam dan babi. Di antara umat manusia ini, rasa saling membenci menjadi hal biasa, kejahatan, pencurian, permusuhan, keinginan membunuh menjadi hal biasa. Ketika para pemburu melihat mangsanya, mereka juga berpikir "Di antara manusia akan ada zaman senjata ketika mereka akan menganggap diri mereka sendiri (bukan sebagai manusia, tetapi) sebagai binatang yang diburu" dan mereka akan saling membunuh yang lain Tetapi ketika mereka kemudian berpikir: "Karena kita terjerumus ke dalam kejahatan, kita menderita kehilangan orang-orang yang kita kasihi Mari kita berbuat baik sekarang mari kita hindari pembunuhan mari kita hormati sanak saudara kita, mari kita lakukan. " kami menghormati para petapa dan brahmana, kami menghormati kepala keluarga Maka hanya akan ada tiga penyakit di antara orang-orang ini, yaitu: kemiskinan, kelaparan dan usia tua, dan dunia ini akan kembali makmur dan sejahtera (Wowor, dkk., 1990: 221).

II.2.9 Edukasi

II.2.9 Pengertian Edukasi

Pendidikan adalah segala keadaan, masalah, kejadian, peristiwa atau proses yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan pendewasaan melalui suatu sistem pembelajaran dan pelatihan (Heri Gunawan, 2021). Sedangkan menurut (Notoatmodjo, 2014), pengertian pendidikan adalah suatu kegiatan atau usaha yang bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat, individu atau kelompok. Dimana, pesan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih baik.

II.2.9.2 Tujuan Edukasi

Menurut (Heri Gunawan, 2021), pendidikan bertujuan untuk memberikan banyak manfaat kepada masyarakat sebagai penerima manfaat pendidikan, antara lain:

- 1) Melalui pendidikan, pengetahuan berkembang
- 2) Kepribadian meningkat
- 3) Masukkan nilai positif
- 4) Melatih untuk mengembangkan bakat yang ada

II.2.9.3 Sasaran Edukasi

Beberapa tujuan pendidikan menurut (Mubarak, 2017) antara lain:

- 1) Pengajaran individual, yaitu pengajaran yang diberikan untuk tujuan individu
- 2) Pendidikan kelompok, yaitu. pendidikan yang diberikan melalui kelompok sasaran
- 3) Pendidikan masyarakat, yaitu. pendidikan yang diberikan untuk mengatasi masyarakat.

II.3.0 Tindakan Pencegahan Korupsi sejak dini

II.3.0.1 Tindakan pencegahan korupsi sejak dini

Untuk mencegah suatu kejahatan atau tindak pidana yang sudah lama meluas, maka untuk menghentikannya harus dicegah sejak dini dengan diinformasikan atau diajarkan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang tidak dapat dimaafkan. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi sejak dini maka diciptakanlah

program pemberantasan korupsi. Perlu pendidikan formal untuk mengajarkan kejahatan dan ketakutan akan korupsi, tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga melalui pendidikan informal. mendidik anak bersikap baik, jujur, dan disiplin sejak dini melalui keluarga dan lingkungannya.

II.3.0.2 Kurikulum Anti Korupsi

A. Konsep Dasar Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan antikorupsi merupakan bagian dari pendidikan karakter. Dengan kata lain, pendidikan antikorupsi adalah pendidikan karakter yang mengedepankan 9 nilai antikorupsi yang dikembangkan KPK, yaitu: kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, kemandirian, keadilan, keberanian dan kebaikan. Nilai-nilai baru tersebut merupakan bagian dari 18 nilai pendidikan karakter yang dikembangkan dan diterapkan sebelumnya di sekolah..

Seperti halnya pendidikan karakter, pendidikan antikorupsi bukan hanya sekedar mempelajari mana yang benar dan mana yang salah. Selain itu, pendidikan antikorupsi merupakan upaya untuk menanamkan kebiasaan baik (pembiasaan) agar peserta didik mampu berperilaku dan bertindak sesuai nilai-nilai yang telah menjadi kepribadiannya. Untuk itu pendidikan antikorupsi harus mencakup pengetahuan yang baik (*moral knowledge*), perasaan yang baik (*love the good*) atau perasaan moral dan perilaku yang baik (*moral action*), sehingga memungkinkan keberhasilan perilaku dan sikap kehidupan unit mahasiswa.

Perilaku atau perbuatan korup bukan hanya akibat dari ketidaktahuan pelaku terhadap dampak perbuatannya terhadap kehidupan masyarakat secara umum, tetapi juga mencakup kebiasaan, sikap mental dan peluang, oleh karena itu kita mencegah berkembangnya sikap mental tersebut. melalui proses enkulturasi atau peradaban. Pendidikan merupakan salah satu strategi dasar pengembangan karakter (termasuk pendidikan antikorupsi) yang dalam pelaksanaannya harus diterapkan secara konsisten dengan banyak strategi lainnya. Strategi tersebut meliputi: sosialisasi atau penyandraan, pemberdayaan, pembudayaan dan kerjasama seluruh komponen bangsa.

Pembangunan karakter dicapai melalui pendekatan sistematis dan integratif yang melibatkan keluarga, satuan pendidikan, pemerintah, masyarakat sipil, badan legislatif, media, dunia usaha, industri dan masyarakat.

- Peran satuan pendidikan

Satuan pendidikan merupakan sarana pembinaan dan pengembangan kepribadian yang dilaksanakan dengan (a) pendekatan terpadu pada semua mata pelajaran, (b) pengembangan budaya satuan pendidikan, (c) pelaksanaan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, dan (d) perilaku yang lazim dalam kehidupan di lingkungan satuan pendidikan. Pengembangan karakter melalui satuan pendidikan berlangsung mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi. Salah satu kunci keberhasilan program pengembangan karakter pada satuan pendidikan adalah keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan. Keteladanan tidak hanya menjadi teladan bagi siswa, namun juga menjadi penguat moral bagi siswa dalam bersikap dan berperilaku. Oleh karena itu, penerapan model di lingkungan satuan pendidikan merupakan prasyarat bagi pengembangan karakter peserta didik. Dengan demikian, satuan pendidikan dapat menjadi agen perubahan di lingkungannya, dimulai dari keluarga, tetangga, dan masyarakat luas.

- Peran keluarga

Keluarga pada dasarnya adalah lingkungan di mana orang tua berperan sebagai aktor dan model utama bagi anak. Proses ini dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, pembiasaan dan keteladanan. Peranan keluarga merupakan sarana pembelajaran dan pembiasaan yang dilakukan oleh orang tua dan orang dewasa lainnya dalam keluarga terhadap anak sebagai anggota keluarga, sehingga diharapkan tercipta keluarga yang berakhlak mulia, diperoleh, dan tercermin dalam perilaku sehari-hari. Proses ini dapat dilakukan melalui komunitas keluarga dan partisipasi keluarga dalam pengelolaan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Pembentukan kepribadian dalam lingkup keluarga juga dapat dilakukan dalam komunitas calon orang tua, meliputi pengetahuan dan keterampilan khususnya dalam hal pengasuhan dan bimbingan anak.

- Peran masyarakat

Masyarakat merupakan alat untuk membangun dan mengembangkan karakter melalui keteladanan tokoh dan tokoh masyarakat, serta berbagai kelompok masyarakat yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan sehingga nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, kebaikan, tanggung jawab, dan lain-lain dapat terpelihara dengan baik. hal tersebut dapat terinternalisasi dalam perilaku dan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah, elite politik, dan dunia usaha/industri merupakan kelompok perwakilan di masyarakat yang harus bersinergi mendukung keberhasilan pendidikan antikorupsi.

2. Tujuan pendidikan antikorupsi

Pendidikan antikorupsi bertujuan untuk mempersiapkan generasi baru agar memiliki budaya integritas (anti korupsi) melalui berbagai kegiatan di sekolah, antara lain dengan pelaksanaan kegiatan manajemen dan pembiasaan, pembelajaran agar setiap individu mempunyai kemampuan menghindar, menolak, melawan atau mencegah segala bentuk tindakan curang dan tindakan lain yang mengarah pada tindakan korupsi. Lebih khusus lagi, pendidikan antikorupsi bertujuan untuk:

- Membangun kehidupan sekolah sebagai bagian integral dari masyarakat dengan menciptakan lingkungan belajar yang berbudaya integritas (anti korupsi), yaitu: jujur, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani, peduli dan bermartabat (bermartabat).);
- Mengembangkan potensi hati/kesadaran peserta didik melalui ranah emosi sebagai manusia yang peka hati dan selalu melestarikan nilai-nilai budaya sebagai wujud rasa cinta tanah air serta didukung oleh visi kebangsaan yang kuat;
- Mengembangkan sikap, perilaku dan kebiasaan terpuji sesuai dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya keagamaan bangsa;
- Menanamkan jiwa kepemimpinan profesional dan bertanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa;
- Menyelenggarakan pengelolaan sekolah secara terbuka, transparan, profesional dan bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaannya, tujuan pendidikan antikorupsi disesuaikan dengan tingkat

perkembangan peserta didik dan jenjang pendidikan, PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MT, SMA/SMK/MA, dan bentuk lain yang sederajat. seperti institusi pendidikan tinggi. Secara rinci tujuan pendidikan antikorupsi diuraikan di bawah ini.

1. Tujuan Pendidikan Antikorupsi di PAUD/TK/RA dan Pendidikan Dasar

Pendidikan antikorupsi di PAUD/TK/RA bertujuan untuk mendidik masyarakat berperilaku baik sejak dini. Dimulai dengan penanaman nilai-nilai kasih sayang (pedagogi cinta), menyikapi kebutuhan dasar anak (makanan sehat dan bergizi, pembelajaran yang disukai anak) dan juga nilai-nilai esensial yang membentuk sikap individu siswa seperti: kejujuran, disiplin, kemandirian, tanggung jawab, kerja keras, kepedulian dan ketekunan yang dibangun melalui proses internal dan konstruktif. Nilai-nilai dasar tersebut akan mempengaruhi nilai-nilai persahabatan, kebaikan, empati, rasa hormat, toleransi dan kepercayaan. Hal ini merupakan awal dari serangkaian upaya yang terus berlanjut hingga ke jenjang pendidikan tinggi.

2. Tujuan Pendidikan Antikorupsi di Pendidikan Menengah

Melanjutkan dari jenjang sebelumnya, pada jenjang menengah, pendidikan antikorupsi bertujuan untuk membekali peserta didik dalam proses perbaikan diri individu. Tergantung pada tingkat perkembangan peserta didik yang memasuki masa remaja, perlu ditekankan kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai individu, agar menjadi warga negara yang baik, dapat diandalkan, dan mandiri, sehingga siap untuk dilatih menjadi sumber daya manusia yang profesional. dan siap berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial. Mengutamakan kualitas, menghargai prestasi, menjaga harga diri namun tetap rendah hati, bersikap adil/tidak diskriminatif dan menghargai orang lain dalam membangun hubungan.

3. Tujuan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Pada jenjang berikutnya, pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi lebih menekankan pada peningkatan kesadaran akan integritas seluruh mahasiswa sebagai calon profesional, manajer, wirausaha, tokoh masyarakat atau ilmuwan, sehingga menjadi teladan bagi seluruh anggota masyarakat. Secara khusus,

kesadaran yang harus dikembangkan selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi antara lain adalah tidak menjiplak karya orang lain, berani mengakui dengan jujur segala kesalahan yang dilakukan, bertanggung jawab atas setiap tugas yang dipercayakan, berani menolak hadiah atau manfaat. sehubungan dengan pelayanan yang diberikan, melakukan pengawasan dan berani melaporkan penyimpangan pengelolaan keuangan kepada kampus, masyarakat atau pemerintah.

2. Sasaran Pendidikan Antikorupsi

Tujuan utama pendidikan antikorupsi adalah lembaga pendidikan yang mempunyai budaya antikorupsi. Instansi pendidikan yang dimaksud adalah PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA dan bentuk lain yang sederajat. Budaya antikorupsi ini diperlukan untuk membangun generasi mendatang yang berintegritas dan mampu menolak korupsi meskipun ada peluang.

II.3.1 Karakteristik Peserta Didik

II.3.1.1 Karakteristik Anak

Setiap individu memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawaan dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan. Karakteristik bawaan adalah karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial psikologis. Karakteristik yang berkaitan dengan perkembangan faktor biologis cenderung lebih bersifat tetap, sedangkan karakteristik yang berkaitan dengan sosial psikologis lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan.

Untuk karakteristik anak di usia Sekolah Dasar yang perlu diketahui para guru, agar lebih mengetahui keadaan peserta didik khususnya di tingkat Sekolah Dasar. Sebagai guru harus dapat menerapkan metode pengajaran yang sesuai dengan keadaan siswanya maka sangatlah penting bagi seorang pendidik mengetahui karakteristik siswanya. Selain karakteristik yang perlu diperhatikan kebutuhan peserta didik. Adapun karakteristik dan kebutuhan peserta didik dibahas sebagai berikut:

Karakteristik pertama anak SD adalah senang bermain. Karakteristik ini menuntut guru SD untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang bermuatan

permainan lebih – lebih untuk kelas rendah. Guru SD seyogyanya merancang model pembelajaran yang memungkinkan adanya unsur permainan di dalamnya. Guru hendaknya mengembangkan model pengajaran yang serius tapi santai. Penyusunan jadwal pelajaran hendaknya diselang saling antara mata pelajaran serius seperti IPA, Matematika, dengan pelajaran yang mengandung unsur permainan seperti pendidikan jasmani, atau Seni Budaya dan Keterampilan (SBK).

Karakteristik yang kedua adalah **senang bergerak**, orang dewasa dapat duduk berjam-jam, sedangkan anak SD dapat duduk dengan tenang paling lama sekitar 30 menit. Oleh karena itu, guru hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak berpindah atau bergerak. Menyuruh anak untuk duduk rapi untuk jangka waktu yang lama, dirasakan anak sebagai siksaan. Karakteristik yang ketiga dari anak usia SD adalah anak **senang bekerja dalam kelompok**. Dari pergaulannya dengan kelompok sebaya, anak belajar aspek-aspek yang penting dalam proses sosialisasi, seperti belajar memenuhi aturan-aturan kelompok, belajar setia kawan, belajar tidak tergantung pada diterimanya dilingkungan, belajar menerimanya tanggung jawab, belajar bersaing dengan orang lain secara sehat (sportif), mempelajari olah raga dan membawa implikasi bahwa guru harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak untuk bekerja atau belajar dalam kelompok, serta belajar keadilan dan demokrasi. Karakteristik ini membawa implikasi bahwa guru harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak untuk bekerja atau belajar dalam kelompok. Guru dapat meminta siswa untuk membentuk kelompok kecil dengan anggota 3-4 orang untuk mempelajari atau menyelesaikan suatu tugas secara kelompok.

Karakteristik yang keempat anak SD adalah **senang merasakan atau melakukan/memperagakan sesuatu secara langsung**. Ditinjau dari teori perkembangan kognitif, anak SD memasuki tahap operasional konkret. Dari apa yang dipelajari di sekolah, ia belajar menghubungkan konsep-konsep baru dengan konsep-konsep lama. Berdasar pengalaman ini, siswa membentuk konsep-konsep tentang angka, ruang, waktu, fungsi-fungsi badan, peran jenis kelamin, moral, dan sebagainya. Bagi anak SD, penjelasan guru tentang materi pelajaran akan lebih

dipahami jika anak melaksanakan sendiri, sama halnya dengan memberi contoh bagi orang dewasa. Dengan demikian guru hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak terlibat langsung dalam proses pembelajaran.

II.3.1.2 Karakteristik Anak Sekolah Menengah

Masa remaja adalah periode penting dalam mencari identitas diri. Pada tahap ini, remaja sering mencoba hal-hal baru dan mulai memahami diri mereka sendiri. Kemampuan mengatur dan mengendalikan emosi menjadi kunci dalam proses ini. Jika remaja tidak mampu mengontrol emosinya, hal tersebut dapat berdampak negatif, seperti perubahan minat yang tidak konsisten, emosi yang tidak stabil, postur tubuh yang buruk, dan perilaku yang menyimpang. (Hurlock, 2011).

A. Usia Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Di Indonesia saat ini, rata-rata usia siswa SMP adalah sekitar 13 tahun, meskipun ada beberapa sekolah yang menerima siswa berusia 12 tahun. Selama tiga tahun berikutnya, mereka akan resmi menjadi siswa Sekolah Menengah Pertama. Rentang usia siswa SMP termasuk dalam kategori remaja awal. Proses perubahan ke fase remaja awal sebenarnya sudah dimulai sejak usia 10 tahun, ketika anak-anak masih di SD, meskipun perubahannya mungkin belum terlalu signifikan.

Anak-anak akan mengalami banyak perubahan selama masa ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika perubahan-perubahan ini bisa membuat orang tua terkejut, terutama jika mereka kurang persiapan dan pengetahuan. Menghadapi anak yang baru saja memasuki usia remaja adalah tantangan yang berbeda dan memerlukan pemahaman yang baik. Dengan memahami karakteristik remaja, orang tua akan lebih siap dan dapat menghindari ekspektasi yang terlalu tinggi atau terlalu rendah.. **Karakteristik Fisik Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP)**

Perubahan fisik yang menandai karakteristik remaja mungkin sudah mulai terjadi pada tahun-tahun terakhir di Sekolah Dasar. Perubahan ini akan terus berkembang seiring waktu. Anak perempuan biasanya mengalami pubertas awal 2-3 tahun lebih cepat dibandingkan anak laki-laki. Bersamaan dengan perubahan fisik ini, Anda juga dapat mulai menyelipkan nilai-nilai agama Islam. Pubertas

dapat membuat anak-anak merasa sangat penasaran, dan di sinilah nilai-nilai agama yang Anda tanamkan akan berperan penting sebagai kontrol diri mereka hingga masa depan.

C. Karakteristik Emosi Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Peran konselor sangat dibutuhkan untuk meningkatkan keterampilan mengontrol emosi siswa. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melatih siswa cara mengontrol emosi mereka. Melatih keterampilan ini dapat membantu siswa memahami bagaimana mengendalikan emosinya, karena setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam mengontrol emosi (Wibowo, 2013). Perubahan emosi merupakan bagian dari perkembangan siswa SMP. Berikut adalah beberapa perubahan tersebut:

a. Lebih Senang Sendiri

Jangan heran jika anak Anda lebih banyak ingin sendirian dibandingkan bersama keluarganya. Pada tahap ini, anak sedang menumbuhkan 'kemerdekaannya' dan menuntut orang tua untuk menghargai privasinya. Anak juga kadang tidak mau diatur oleh orang tua, karena merasa memiliki keinginannya sendiri.

b. Mood yang Berubah-Ubah

Siswa SMP menjadi lebih sensitif, mudah tersinggung, dan *moody*. Perubahan emosi ini terjadi karena mereka sedang mengalami pubertas, dengan fluktuasi hormon yang berperan penting dalam perubahan *mood*.

c. Memperhatikan Penampilan

Kesadaran terhadap penampilan meningkat seiring berkembangnya sistem reproduksi mereka. Mereka cenderung mementingkan diri sendiri, dan hal-hal kecil yang sepele bisa tampak sebagai masalah besar karena mereka cenderung membesar-besarkan suatu masalah. poin ini, Anda dapat mendukung anak dengan mengajarkannya bertanggung jawab. Sebagai orang tua, terlalu banyak mengatur anak di usia remaja Sikap memaksa hanya akan menimbulkan perlawanan, terutama karena anak remaja berada dalam fase di mana mereka tidak segan melawan jika batas pribadinya terusik.

Menyadari bahwa anak Anda sudah bukan anak kecil lagi dapat membantu Anda untuk mulai 'melonggarkan' aturan-aturan secara perlahan. Namun, jangan

lupa untuk terus menerapkan nilai-nilai keluarga dan agama, agar meskipun anak-anak menjadi lebih mandiri, mereka tetap bertanggung jawab dalam kebebasannya.

II.3.1.3 Karakteristik Anak Sekolah Menengah Pertama

Menurut Sukintaka dalam lanun (2007:19-20) karakteristik anak SMA umur 16-18 tahun antara lain :

a. Psikis atau Mental

1. Banyak memikirkan dirinya sendiri.
2. Mental menjadi stabil dan matang.
3. Membutuhkan pengalaman dari segala segi.
4. Sangat senang terhadap hal-hal yang ideal dan senang sekali bila memutuskan masalah-masalah kepercayaan

b. Sosial pendidikan, pekerjaan,

1. Sadar dan peka terhadap lawan jenis.
2. Lebih bebas. perkawinan, pariwisata dan
3. Berusaha lepas dari lingkungan orang dewasa atau pendidik.
4. Senang pada perkembangan sosial.
5. Senang pada masalah kebebasan diri dan berpetualang.
6. Sadar untuk berpenampilan dengan baik dan cara berpakaian rapi dan baik.
7. Tidak senang dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh kedua orang tua.
8. Pandangan kelompoknya sangat menentukan sikap pribadinya.

c. Perkembangan Motorik

Anak akan mencapai pertumbuhan dan perkembangan pada masa dewasanya, keadaan tubuhnya pun akan menjadi lebih kuat dan lebih baik, maka kemampuan motorik dan keadaan psikisnya juga telah siap menerima latihan-latihan peningkatan ketrampilan gerak menuju prestasi olahraga yang lebih. Untuk itu mereka telah siap dilatih secara intensif di luar jam pelajaran. Bentuk penyajian pembelajaran sebaiknya dalam bentuk latihan dan tugas.

II.3.2 Definisi interaktif

desain yang mengutamakan keterlibatan aktif pengguna dalam berinteraksi dengan produk atau ruang yang dirancang. Hal ini mencakup penggunaan teknologi

yang memungkinkan respon langsung terhadap tindakan pengguna, seperti layar sentuh, panel interaktif, atau elemen fisik yang dapat diubah oleh pengguna.

II.3.2.1 Ruang Interaktif

Ruang interaktif adalah ruang yang dirancang untuk memungkinkan pengguna berpartisipasi secara langsung dalam suatu aktivitas atau pengalaman melalui berbagai teknologi dan media. Ruang ini bisa melibatkan layar sentuh, sensor, atau teknologi lainnya yang memungkinkan interaksi antara pengguna dan sistem. Konsep ruang interaktif sering digunakan dalam pameran, museum, atau lingkungan pendidikan untuk menciptakan pengalaman yang lebih imersif dan menarik.

II.3.3 Mini Teater/Bioskop

Untuk pembuatan mini teater, standar ukuran yang dianjurkan adalah 2,5 hingga 3 meter persegi. Teater ini harus dilengkapi dengan TV yang mendukung format 1080p hingga 4K, serta sistem surround dengan format 5.1 speaker kecil. Penempatan speaker harus tepat agar suara dari video dapat mencapai semua penonton.

Berikut adalah penempatan yang disarankan:

- Satu speaker di sisi kiri layar
- Satu speaker di sisi kanan layar
- Satu speaker di tengah
- Satu speaker di sudut kiri belakang teater
- Satu speaker di sudut kanan belakang teater
- Penambahan subwoofer di sudut ruangan

Mini teater ini dapat dihubungkan melalui laptop menggunakan kabel HDMI atau menggunakan handphone melalui Bluetooth, dengan kapasitas hingga 6 orang.

Sumber : <https://www.99.co/id/panduan/bioskop-mini/>

II. 3.4 Definisi Simulasi

Jerry Banks dkk. (2010) dalam bukunya Discrete-Event System Simulation menyatakan bahwa simulasi adalah teknik eksperimental untuk mempelajari

sistem yang ada dengan menggunakan model yang merepresentasikan sistem tersebut. Melalui simulasi, dapat dianalisis bagaimana sistem beroperasi di bawah berbagai kondisi tanpa harus mempengaruhi sistem yang nyata.

II.3.4.1 Ruang Simulasi

Menurut David M. Gaba (1988), dalam artikel *The Future Vision of Simulation in Health Care*, juga membahas tentang ruangan simulasi sebagai tempat pelatihan yang aman dan terkendali, di mana kesalahan dapat terjadi tanpa konsekuensi nyata.

II.3.5 Definisi Display

Display dalam konteks desain interior merujuk pada cara di mana objek atau elemen dekoratif diatur dan ditampilkan di dalam suatu ruang untuk mencapai tujuan estetika, fungsional, atau komunikatif tertentu. Display dapat mencakup berbagai elemen seperti furnitur, karya seni, pencahayaan, dan aksesori yang diatur dengan cara yang mempertimbangkan komposisi visual, ergonomi, serta tujuan dari ruang tersebut. Tujuan dari display bisa bervariasi, mulai dari menciptakan fokus visual, mengarahkan aliran gerakan dalam ruang, hingga menyampaikan pesan tertentu kepada pengunjung.

II.3.6 Display Interaktif

Display Interaktif adalah teknologi atau sistem tampilan yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara langsung dengan konten yang ditampilkan melalui berbagai bentuk input, seperti sentuhan, gerakan, suara, atau alat input lainnya. Dalam desain interior dan ruang publik, display interaktif digunakan untuk menciptakan pengalaman yang lebih *engaging* dan partisipasi, di mana pengguna tidak hanya menjadi pengamat pasif tetapi juga dapat memanipulasi dan berinteraksi dengan informasi yang disajikan.

II.3.7 Antropometri

Dalam konteks antropometri museum, terdapat beberapa faktor penting yang harus diperhatikan untuk menciptakan pengalaman yang nyaman dan inklusif bagi semua pengunjung, termasuk anak-anak. Antropometri adalah ilmu yang mempelajari dimensi tubuh manusia, termasuk ukuran dan proporsi tubuh. Dalam desain interior museum, informasi antropometri sangat penting untuk menentukan ukuran dan jarak elemen desain, seperti tinggi panel informasi, kursi, meja, dan

elemen interaktif lainnya, agar sesuai dengan berbagai ukuran tubuh pengunjung, termasuk anak-anak.

Indonesia Antropometri
THE LARGEST ANTHROPOMETRY DATA IN INDONESIA

Perhimpunan Ergonomi Indonesia

YOU ARE HERE Kompilasi Data → Data Antropometri

Data Antropometri

Rekap Data Antropometri Indonesia

Suku - Semua Suku , Jenis Kelamin - Semua Jenis Kelamin, Tahun - 2003 s/d 2014 , Usia - 7 s/d 19

Dimensi	Keterangan	5th	50th	95th	SD
D1	Tinggi tubuh	104.35	143.45	182.55	23.77
D2	Tinggi mata	95.33	133.64	171.95	23.29
D3	Tinggi bahu	85.44	119.03	152.62	20.42
D4	Tinggi siku	65.03	90.1	115.16	15.24
D5	Tinggi pinggul	41.73	81.76	121.78	24.33
D6	Tinggi tulang ruas	42.41	62.03	81.65	11.93
D7	Tinggi ujung jari	34.34	56.1	77.86	13.23
D8	Tinggi dalam posisi duduk	56.22	73.13	90.04	10.28
D9	Tinggi mata dalam posisi duduk	46.33	63.22	80.1	10.27
D10	Tinggi bahu dalam posisi duduk	32.84	50.7	68.56	10.86
D11	Tinggi siku dalam posisi duduk	7.71	22.26	36.81	8.85
D12	Tebal paha	3.78	12.96	22.15	5.58
D13	Panjang lutut	33.8	47.03	60.25	8.04
D14	Panjang popliteal	28.73	38.29	47.85	5.81
D15	Tinggi lutut	32.67	45.36	58.05	7.71
D16	Tinggi popliteal	28.51	38.44	48.37	6.04
D17	Lebar sisi bahu	23.03	36.37	49.71	8.11
D18	Lebar bahu bagian atas	9.71	27.61	45.51	10.88
D19	Lebar pinggul	19.09	30.45	41.81	6.91
D20	Tebal dada	11.3	17.96	24.63	4.05
D21	Tebal perut	9.76	19.53	29.3	5.94
D22	Panjang lengan atas	19.54	29.5	39.46	6.06
D23	Panjang lengan bawah	24.25	38.54	52.82	8.68
D24	Panjang rentang tangan ke depan	44.41	62.88	81.36	11.23
D25	Panjang bahu-genggaman tangan ke depan	40.78	54.43	68.09	8.3
D26	Panjang kepala	9.52	18.02	26.52	5.17
D27	Lebar kepala	12.07	15.65	19.23	2.17
D28	Panjang tangan	9.94	16.34	22.73	3.89
D29	Lebar tangan	2.57	8.74	14.91	3.75
D30	Panjang kaki	11.5	21.65	31.8	6.17
D31	Lebar kaki	5.78	9.05	12.32	1.99
D32	Panjang rentangan tangan ke samping	97.2	142.94	188.69	27.81
D33	Panjang rentangan siku	49.2	75.34	101.47	15.89
D34	Tinggi genggaman tangan ke atas dalam posisi berdiri	123.15	174.19	225.24	31.03
D35	Tinggi genggaman ke atas dalam posisi duduk	70.18	105.74	141.3	21.62
D36	Panjang genggaman tangan ke depan	42.45	61.23	80.01	11.42

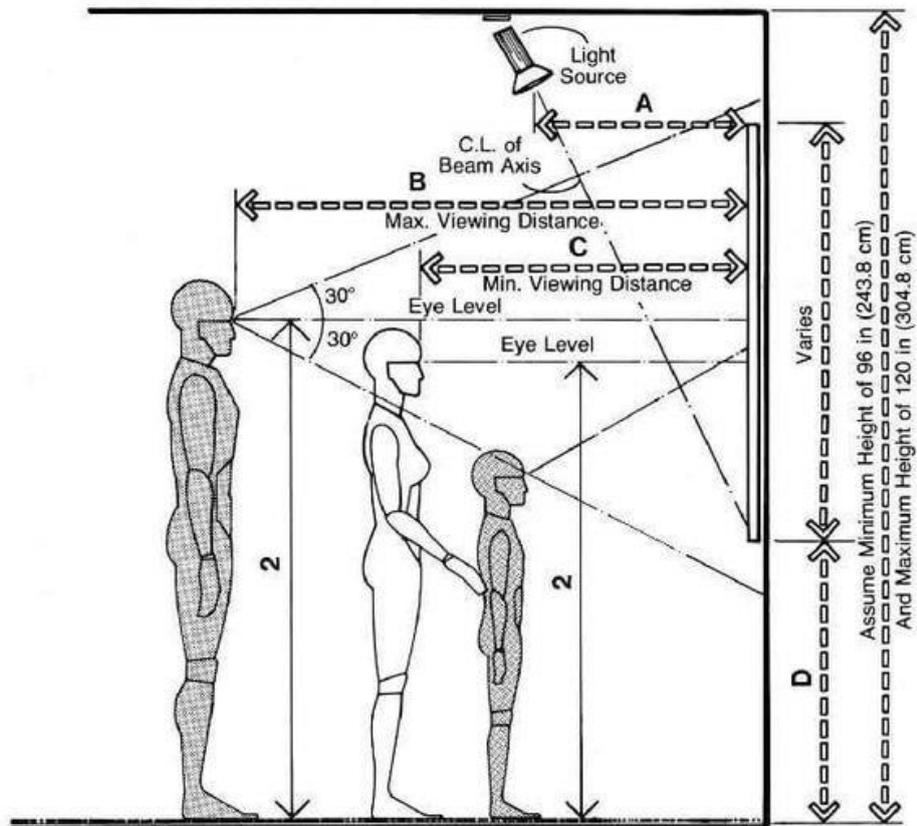
Gambar 2.1 Tabel Ukuran Antropometri (sumber : Google)

MEDIDAS DEL CUERPO

EL HOMBRE
DIMENSIONES Y ESPACIO NECESARIO
(Según medidas promedio)



Gambar 2.3 Gambar Antropometri duduk sila
(Sumber : Google)



DISPLAY OF ARTWORK

The drawing shown above illustrates the relationship between human dimension and the display of art work. Eye height is the significant anthropometric body measurement here. It should be noted, however, that the visual angle in which small detail can be sharply defined without rotating the eyes is only about 1° . Therefore, the drawing should be used as a basis for preliminary design assumptions about art work generally, and even in viewing the art work shown here, a certain amount of scanning or eye rotation is required. In addition, the horizontality of the line of sight is theoretical. Most of the time the body and head are in a relaxed position and the line of sight is slightly below the horizontal. A more detailed discussion of the visual and anthropometric considerations regarding the viewing of displays can be found in Section 9 in Part C. The following drawing provides some useful information concerning human dimension and the clearances required for coat removal.

Gambar 2.4 Antropometri Display
(Sumber : Google)

II.3.6 Interktife Led

Menurut situs web Central Led, Interactive Panel adalah susunan panel atau layar LED yang mampu merespons tindakan tertentu. Konsepnya mirip dengan smart TV, yang dapat diajak berinteraksi melalui sentuhan atau gerakan sesuai dengan sistem yang tertanam.

Jenis Interactive Flat Panel

Panel interaktif terbagi menjadi dua klasifikasi umum untuk korporasi dan untuk edukasi. Meskipun keduanya menggunakan teknologi yang sama, penggunaannya berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Interactive Panel untuk Korporasi

Jenis pertama adalah teknologi yang berfokus pada kebutuhan bisnis atau perusahaan. Selain untuk interaksi, teknologi ini juga bermanfaat untuk layanan dan presentasi. Selain itu, teknologi ini dapat membantu menghemat banyak biaya pengadaan barang.

1. *Inreactive Panel untuk Edukasi*

Jenis berikutnya berfokus pada kebutuhan pendidikan, terutama untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang lebih interaktif di dalam kelas. Teknologi ini menggantikan peran whiteboard dan metode konvensional dengan menggunakan sistem yang lebih modern.

Fungsi Teknologi Interactive Panel

1. Menarik Perhatian Audiens

Fungsi utama dari interactive panel adalah untuk menarik perhatian audiens dengan memanfaatkan teknologi yang lebih mutakhir. Dengan visual yang lebih hidup dan menarik, presentasi akan lebih memikat sebagian besar audiens. Meningkatkan Efisiensi Kegiatan Kolaborasi

Berbagai kegiatan kolaborasi juga menjadi lebih efisien, dengan perhatian audiens yang fokus pada penampilan. Selain itu, banyak fitur interaksi yang memungkinkan audiens melakukan berbagai interaksi seperti memberi komentar, mencari tahu detail informasi, sehingga menjelajah internet untuk menyamakan persepsi public.

2. Meningkatkan Efisiensi Presentasi

Sebagai seorang pembicara atau penyaji materi, presentasi akan menjadi lebih efisien. Anda dapat melakukan perbaikan secara langsung, menunjukkan detail prototipe, dan menganalisis kinerja secara langsung melalui alat online.

3. Menjadi *Smart Whiteboard*

Fungsi lain dari teknologi interactive panel adalah sebagai smart whiteboard yang ramah lingkungan dan dapat mengurangi pengeluaran untuk alat tulis. Selain itu, interactive whiteboard memudahkan audiens dalam memahami materi dengan membuat informasi lebih jelas dan mudah dipahami.

4. Meningkatkan Interaksi dan Partisipasi Audiens

Dengan berbagai aspek efisiensi dan kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi, panel interaktif dapat meningkatkan ketertarikan audiens. Dengan menggabungkan penyampaian yang jelas dan menarik, teknologi ini dapat memperbaiki interaksi dan partisipasi audiens dalam kegiatan kolaborasi, rapat, maupun pembelajaran..

Produk Interactive Panel Terbaik Dari Central LED

1. *Smart Screen* dari Axioo
2. *MyPc Pro Ops Family series*

II.3.5 Karakteristik Pengunjung

Wisatawan didefinisikan secara beragam oleh para ahli. Menurut (Inskeep) (1991), wisatawan adalah individu atau kelompok yang mengunjungi suatu tempat tertentu, baik itu negara, provinsi, perkotaan, atau desa yang berbeda dari tempat tinggal mereka, dengan tujuan selain mencari mata pencaharian. Wisatawan dibagi menjadi dua kategori: wisatawan temporer, yaitu mereka yang menetap sedikitnya 24 jam di lokasi kunjungan, dan pelancong, yaitu wisatawan yang menetap kurang dari 24 jam dan biasanya tidak menginap. Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisatawan mendefinisikan wisatawan sebagai orang yang melakukan wisata.

Karakteristik wisatawan, menurut (Seaton dan Bennet) (1996), terbagi atas dua karakteristik umum, yaitu berdasarkan karakteristik perjalanannya (*trip descriptor*) dan karakteristik wisatawannya (*tourist descriptor*). Pada karakteristik trip descriptor, wisatawan dibagi berdasarkan jenis perjalanan yang dilakukan.

Sementara itu, *tourist descriptor* memfokuskan karakteristiknya langsung pada wisatawan, mencakup siapa, apa yang diinginkan, kenapa, kapan, dan di mana.

Menurut Smith (1995), terdapat dua jenis karakteristik wisatawan:

1. Karakteristik Sosio-Demografis: Pembagian karakteristik ini sering digunakan untuk kepentingan analisis pariwisata, perencanaan, dan pemasaran.

2. Karakteristik Psikografis: Mengklasifikasikan wisatawan berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, dan karakteristik personal. Karakteristik psikografis lebih menekankan pada motivasi yang melatarbelakangi perjalanan, dengan beberapa indikator seperti:

- Keinginan berinteraksi dengan masyarakat setempat
- Tujuan melakukan perjalanan untuk bersenang-senang
- Objek wisata yang dikenal di kalangan masyarakat
- Berwisata dengan sedikit orang
- Melakukan banyak kegiatan wisata
- Menginginkan fasilitas wisata yang lengkap
- Sikap dan aksi baik di tempat wisata
- Pengetahuan tentang objek yang dikunjungi
- Menyesuaikan gaya hidup dengan tempat wisata
- Keamanan dan kenyamanan dalam memilih tempat wisata

Analisis karakteristik wisatawan juga dapat dilakukan berdasarkan karakteristik-karakteristik ini. Karakteristik wisatawan dapat dianalisis berdasarkan sosio-demografis, geografis, dan psikografis. Karakteristik sosio-demografis mencakup jenis kelamin, umur, status perkawinan, tingkat pendidikan, pekerjaan, kelas sosial, ukuran keluarga, atau jumlah anggota keluarga, serta aspek-aspek lain yang terkait.

Karakteristik geografis membagi wisatawan berdasarkan lokasi tempat tinggalnya, yang biasanya dibedakan menjadi desa-kota, provinsi, atau negara asalnya.

Sedangkan karakteristik psikografis membagi wisatawan ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, dan karakteristik personal. (Nugroho, 2019).

II.3.6 Studi Image



Gambar 2.5 Interaktif wall panel

(Sumber :Pinterest)



Gambar 2.6 Time Line

(Sumber :Pinterest)



Gambar 2.7 Lobi modern
(Sumber:Pinterest)



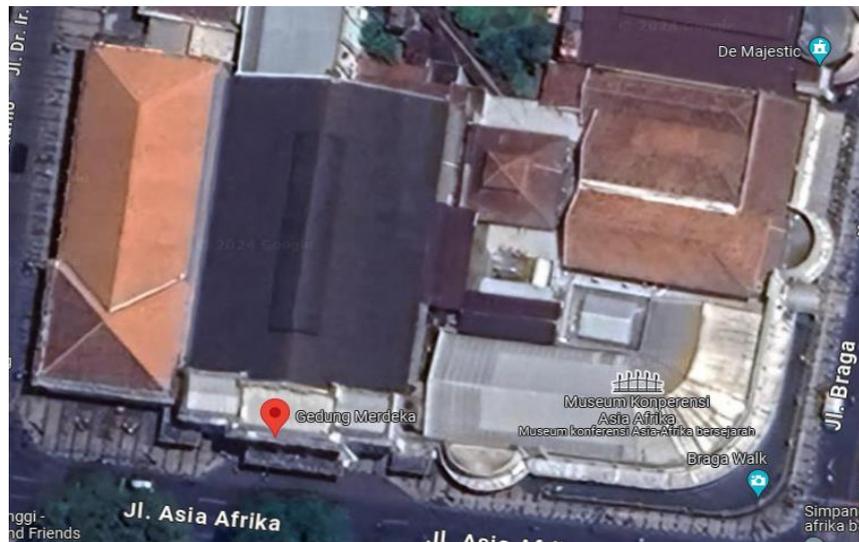
Gambar 2.8 Lobi taman bermain indoor
(Sumber:Pinterest)



Gambar 2.9 Lobi modern
(Sumber:Pinterest)

II.3.7 Studi Lapangan/Studi Banding

II.3.7.1 Lokasi Studi Lapangan



Gambar 3.1 Map Gedung Merdeka

(sumber : www.google.com/maps/)

Gedung ini terletak di Jl. Asia Afrika No.65, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40111 yang sangat dekat dengan masjid agung bandung dan jln beraga yang cukup terkenal.

II.3.7.2 Deskripsi Singkat

Gedung Merdeka adalah salah satu gedung yang sangat bersejarah bagi indoneisa karena gedung ini pernah di jadikan sebagai tempat KAA atau Konfrensi Asia Afrika, gedung ini di bangun pada 1895 dan gedung ini di namai gedung *Societeit Concordia*, Pada tanggal 7 April 1955, Presiden Soekarno mengganti nama Gedung *Societeit Concordia* menjadi Gedung Merdeka. Dan gedung ini sempat di renovasi pada tahun 1926 oleh *Wolff Schoemacher*, Aalbers dan Van Gallen. Sebelum di jadikan sebagai bangunan untuk KAA bangunan ini Pada masa kedudukan jepang di gunakan sebagai pusat kebudayaan, gedung ini sempat di jadikan sebagai markas pemuda indonesia pada 17 agustus 1945, dan gedung ini pernah menjadi gedung MPRS atau gedung majelis permusyawarahan rakyat sementara, sekarang gedung ini menjadi museum KAA

II.3.7.3 Waktu Kunjungan

Waktu kunjungan untuk Gedung merdeka ini terbuka untuk umum dari hari Senin – Jumat dan dari jam 09.00-16.00.

Area Gedung Merdeka



Gamabar 3.2 Ruang Pamer

(sumber : <https://www.youtube.com/>)

Ruangan museum ini menjelaskan segala hal tentang KAA atau Konfrensi Asia Afrika, sejumlah koleksi berupa benda-benda tiga dimensi dan foto-foto dokumenter peristiwa Pertemuan Tugu, Konferensi Kolombo, Konferensi Bogor, dan Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Dan Diorama Pembukaan Konferensi Asia Afrika,1955



Gambar 3.3 Perpustakaan

(sumber : <https://www.youtube.com/>)

Gedung merdeka pun mempunyai Perpustakaan ini memiliki sejumlah buku mengenai sejarah, sosial, politik, dan budaya Negara-negara Asia Afrika, dan negara-negara lainnya dokumen-dokumen mengenai Konferensi Asia Afrika dan

konferensi-konferensi lanjutannya; serta majalah dan surat kabar yang bersumber dari sumbangan/hibah dan pembelian.



Gambar 3.4 Ruang Audiovisual

(sumber : <https://www.youtube.com/>)

Ruang Audiovisual Ruangan ini menjadi sarana untuk penayangan film-film dokumenter mengenai kondisi dunia hingga tahun 1950-an, Konferensi Asia Afrika dan konferensi-konferensi lanjutannya, serta film-film mengenai kebudayaan dari Negara Indonesia.



Gambar 3.5 Auditorium

(sumber : <https://www.youtube.com/>)

Ruang Utama ini adalah ruangan yang di gunakan untuk KAA atau konpfrensi asia afrika dan terdapat beberapa benda benda bersejarah seperti gong perdamaian dan batu MPRS, serta bendera yang berjumlah 109 plus 1 bendera unicef dan tiang benderanya pun di bagi menjadi dua warna yaitu warna abu dan emas

II.3.7.5 Lapas Sukamiskin



Gambar 3.6 Maps Lpasa Sukamiskin

(sumber : : www.google.com/maps/)

Bangunan ini terletak di daerah Jl. A.H. Nasution No.114, Cisaranten Bina Harapan, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40294 dan menjadi lapas untuk para pejabat.

II.3.7.6 Deskripsi

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin terletak di Jalan A.H. Nasution Nomor 114, Bandung. Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin dibangun pada masa kolonial Belanda, tepatnya tahun 1918. Lapas Kelas I Sukamiskin bertugas melakukan pembinaan untuk meningkatkan kualitas narapidana dalam beberapa aspek, termasuk ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesionalisme, serta kesehatan jasmani dan rohani. Selain itu, Lapas ini juga berfokus pada kualitas keamanan dalam pelayanan.

Misi Lapas Kelas I Sukamiskin adalah melaksanakan pembinaan sekaligus mempersiapkan warga binaan agar siap kembali ke masyarakat dan menjadi individu yang berperan aktif dalam pembangunan negara. Program-program yang dijalankan meliputi:

- a. Pembinaan rohani dan emosional dalam agama
- b. Pembinaan keterampilan (soft skills) yang berbasis pada kebutuhan masyarakat

- c. Perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi warga binaan
- d. Menjaga keamanan bagi masyarakat, petugas, dan warga binaan
- e. Menjadi Lapas yang akuntabel dan memberikan pelayanan prima bagi publik

Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin lebih banyak menampung narapidana dengan tindak pidana khusus, seperti korupsi, dibandingkan dengan tindak pidana umum. Sistem pemasyarakatan di Lapas ini didasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang bertujuan untuk membentuk warga binaan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana agar dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Lingkungan masyarakat dapat berperan aktif dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Setiap lembaga pemasyarakatan (Lapas) memiliki tingkatannya masing-masing, seperti Kelas I, Kelas II, dan seterusnya. (Tinjauan et al., n.d.)

II.3,7,7 Gambar Lapas Sukamiskin



Gambar 3.7 Pasad Lapas Sukamiskin

(sumber : <https://www.antaraneews.com/>)



Gambar 3.8 Penjara Sukamiskin
(sumber : <https://www.antaraneews.com/>)

II.3.8 Studi Present

II.3.8.1 Seoul Childern Museum



Gambar 3.9 & 4.0 Seol Museum Child
(sumber :Seol Museum Child)

Deskripsi

" *children designing happiness*" adalah tema pameran interaktif di Museum Anak Seoul. Program ini tidak hanya membuat anak-anak senang, tetapi orang dewasa dan guru juga senang karena mengajarkan anak-anak bahwa orang lain memiliki perasaan takut dan benci. Pemeran dimaksudkan untuk mendorong kreativitas dan

komunikasi sambil memenuhi kebutuhan perkembangan unik masing-masing kelompok umur. Museum Anak Seoul memiliki sesuatu untuk setiap anak

II.3.9 Studi Pengayaan



Gambar 4.1 Modern Ruang Tengah
(Sumber: Pinterest)

Sejarah Modern

Langgam modern telah berkembang selama kurang lebih setengah abad, dimulai dari sekitar tahun 1920 hingga 1960, berawal dari Revolusi Industri (1760-1863) di Inggris. Revolusi Industri membawa perubahan besar dalam bidang teknologi, sosial, dan kebudayaan, termasuk dalam arsitektur dan desain yang dipengaruhi oleh perubahan masyarakat. Langgam modern secara bertahap menghilangkan ornamen dan dekorasi yang banyak terdapat pada era pra-modern, menggantinya dengan bentuk-bentuk geometris yang sederhana. Bentuk geometris sederhana ini menjadi ciri khas arsitektur langgam modern. Setelah berkembang beberapa lama, langgam modern dapat disimpulkan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Memiliki keseragaman dalam penggunaan skala manusia.

2. Bangunan bersifat fungsional, artinya bangunan dirancang untuk mencapai tujuan semaksimal mungkin sesuai dengan fungsinya.
3. Bentuk bangunan sederhana dan bersih, dipengaruhi oleh seni kubisme. abstrak, yang terdiri dari bentuk-bentuk aneh tetapi intinya adalah bentuk segi empat.
4. Konstruksi bangunan diperlihatkan secara jelas.
5. Penggunaan bahan pabrik ditampilkan secara jujur, tanpa tambahan ornamen atau dekorasi.
6. Interior dan eksterior bangunan terdiri dari garis-garis vertikal dan horizontal.
7. Konsep open plan membagi elemen-elemen bangunan menjadi struktur primer dan sekunder, bertujuan untuk mencapai fleksibilitas dan variasi dalam desain.

Warna Desain Modern

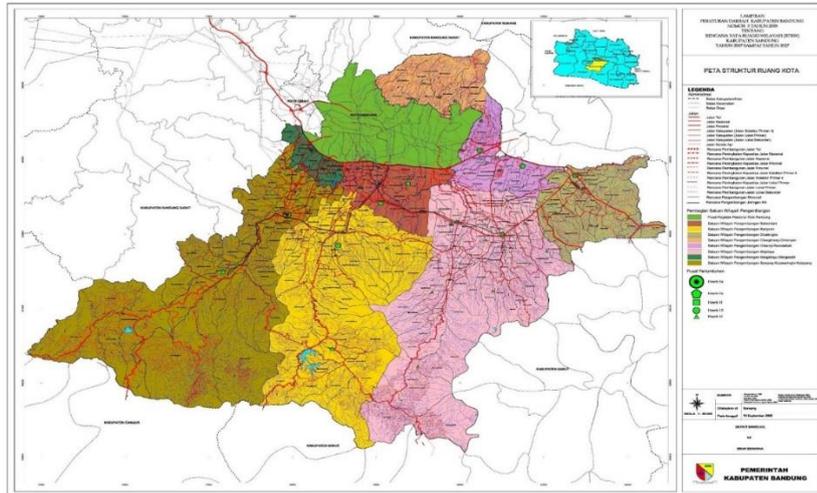
Dalam gaya modern, warna yang digunakan adalah warna-warna netral untuk menciptakan kesan ruangan yang luas. Warna-warna seperti putih, abu-abu, atau abu-abu kebiruan digunakan untuk memberikan efek menjauh, sehingga ruangan terasa lebih luas. Menurut (Fritz Wilkening), benda yang berada dekat dengan kita menampilkan warna yang terang dan jelas, seperti kuning atau merah yang mencolok. Sebaliknya, benda yang berada jauh akan terlihat kebiruan, seolah-olah tertutup oleh cadar lembut berwarna abu-abu kebiruan..

Material Desain Modern

Karakteristik gaya modern yang bersih mempengaruhi pemilihan material dalam perancangan, di mana selain permukaan material, struktur material juga menjadi pertimbangan penting. Bentuk efisien dari gaya modern biasanya menciptakan desain yang sederhana dan presisi, sehingga material yang dipilih sering kali adalah material yang mudah diproses dan cepat dalam penggunaannya. Berdasarkan uraian tersebut, material yang bersifat solid, seperti kayu, gypsum, dan PVC dengan finishing bersih atau sedikit mengkilap, sering digunakan. Selain itu, logam seperti besi, aluminium, dan stainless steel dengan permukaan mengkilap atau doff, juga dipilih karena tampilannya yang bersih. Material natural

seperti kayu dengan finishing *clear* dan bentuk yang sederhana juga dapat dipadukan untuk menambah estetika gaya modern.

II.4.0 Studi Site



Gambar 4.2 Peta Bandung
(sumber:Peta Kota)

Secara geografis, Kota Bandung terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan ibu kota provinsi Jawa Barat. Kota ini terletak pada koordinat $107^{\circ} 30' - 107^{\circ} 45'$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 00' - 6^{\circ} 20'$ Lintang Selatan, dengan ketinggian rata-rata sekitar 768 meter di atas permukaan laut. Titik tertinggi kota ini berada di daerah utara, dengan ketinggian mencapai 1050 meter di atas permukaan laut (MDPL), sementara titik terendah terletak di sebelah selatan, pada ketinggian 675 MDPL.

Kota Bandung adalah kota terbesar keempat di Indonesia, setelah Jakarta, Surabaya, dan Medan. Selain suhu udara yang sejuk, Bandung menjadi salah satu destinasi wisata yang populer. Kota ini juga dikenal sebagai pusat pendidikan dengan banyak institusi yang menjadi pilihan masyarakat Indonesia.

Topografi Kota Bandung terletak pada ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut. Titik tertinggi berada di Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cicadap, dengan ketinggian 892 mdpl, sedangkan titik terendah berada di Kelurahan Rancanumpang, Kecamatan Gedebage, pada ketinggian 666 mdpl. Wilayah Bandung dikelilingi oleh pegunungan, membentuk kota ini sebagai semacam cekunga

